



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Program Sekolah Satu Atap dan Dampaknya pada Pekerja Anak:



Sebuah Studi Kasus di
Kabupaten Sukabumi

Juli 2011

Daftar Isi

1.	RINGKASAN EKSEKUTIF	5
2.	PENGANTAR	7
3.	METODOLOGI KAJIAN DAMPAK	11
3.1.	Metodologi	11
3.2.	Kualitas Data	11
3.3.	Definisi	12
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI SUKABUMI: IKHTISAR	13
4.1.	Masyarakat	15
4.1.1.	Latar Belakang Sosial Ekonomi	15
4.1.2.	Pandangan terhadap Pentingnya Pendidikan	16
4.1.3.	Alasan-alasan untuk memilih SMP Satu Atap	17
4.2.	Tantangan, Kualitas dan Apa yang Harus Dilakukan di SMP Satu Atap	17
4.2.1.	Tantangan	17
4.2.2.	Kualitas	20
4.2.3.	Apa yang Harus Dilakukan	21
5.	DAMPAK SMP SATU ATAP	23
5.1.	Peran SMP Satu Atap terhadap Keputusan Anak dan Orang Tua untuk melanjutkan pendidikan ke SMP	23
5.2.	Dampak SMP Satu Atap terhadap Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP	24
5.3.	Peran SMP Satu Atap dalam Meningkatkan Angka Partisipasi SMP di Daerah Tersebut	24
5.4.	SMP Satu Atap dan Angka Putus Sekolah di Sekolah Menengah Pertama	27
5.5.	Peran SMP Satu Atap dalam Meningkatkan Prospek Kerja Anak	28
5.6.	Dampak SMP Satu Atap terhadap Kegiatan Anak-Anak	28

6.	ANAK-ANAK PUTUS SEKOLAH	33
6.1.	Alasan-Alasan Tidak Melanjutkan Pendidikan ke SMP	33
6.2.	Kegiatan Anak-Anak Putus Sekolah	35
7.	SMP Satu Atap dan Pengurangan Pekerja Anak	37
	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	43
	REFERENSI	45

Latar Belakang Penelitian. Indonesia adalah salah satu Negara yang berkomitmen untuk mencapai Pendidikan untuk Semua dan dalam usahanya untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua, pada tahun 2005 Pemerintah Indonesia meluncurkan PROGRAM SEKOLAH SATU ATAP. Sekolah satu atap adalah tempat di mana dibangun 3 ruang kelas SMP bersama dengan sekolah dasar.

Strategi ini digunakan untuk mengatasi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam mencapai sasaran pendidikan dasar universal, yaitu masalah transisi antara sekolah dasar ke sekolah menengah pertama (SMP), di mana kebanyakan angka partisipasi siswa merosot saat transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA karena alasan-alasan ekonomi. Program sekolah satu atap dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengakomodasi lebih banyak siswa dan dengan demikian mempercepat tercapainya program pendidikan dasar sembilan tahun dengan membuat fasilitas-fasilitas SMP dekat dengan lulusan-lulusan SD.

SMP Satu Atap di Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi seluruhnya terdapat 19 SMP Satu Atap yang beroperasi di 14 Kecamatan. Pada tahun ajaran 2010-2011, sekitar 2003 siswa terdaftar di SMP Satu Atap.

Kondisi Sosial Ekonomi. Kebanyakan orang tua siswa SMP Satu Atap bekerja sebagai buruh tani lepas karena tidak memiliki lahan sendiri. Pendapatan bulanan kebanyakan orang tua (yang tidak memiliki lahan sendiri) berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000.¹

Pandangan terhadap Pentingnya Pendidikan. Baik orang tua maupun anak benar-benar menganggap penting pendidikan. Namun pandangan positif ini tidak otomatis terwujud dalam tindakan atau dukungan nyata, karena latar belakang dan rendahnya pendidikan orang tua menjadi penghalang besar untuk langsung terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka.

Alasan-alasan Memilih SMP Satu Atap. Alasan-alasan di balik keputusan orang tua dan anak untuk meneruskan ke SMP Satu Atap adalah: jarak dari rumah ke sekolah, gratis, harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan bagusya reputasi sekolah.

Tantangan dan Kualitas SMP Satu Atap. Tantangan yang dihadapi oleh SMP Satu Atap antara lain adalah kurangnya dana, tidak memadainya sarana, peralatan dan perlengkapan sekolah, perlu ditingkatkannya kualitas guru, kurangnya dukungan masyarakat, tingginya tingkat mangkir guru dan siswa, dan lokasi yang sulit. Tantangan-tantangan ini dianggap mengurangi kualitas SMP Satu Atap.

1 Di bulan Juli 2011 USD 1 = Rp 8.550

Anak-anak yang Bekerja. Banyak anak (kebanyakan laki-laki) ditemukan terlibat dalam kegiatan ekonomi, kebanyakan untuk membantu orang tua. Akan tetapi pekerjaan ini tidak mempengaruhi prestasi akademis mereka dan tidak dianggap mengganggu sekolah.

Kontribusi Positif SMP Satu Atap. SMP Satu Atap telah memberikan kontribusi positif dalam: mempengaruhi keputusan orang tua dan anak-anak untuk melanjutkan ke SMP, meningkatkan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, serta meningkatkan angka partisipasi di berbagai daerah di mana sekolah-sekolah didirikan. Namun demikian, bertambah banyaknya jumlah SMP Satu Atap tidak selalu berarti semakin tingginya Angka Partisipasi Murni. SMP Satu Atap terbukti jauh lebih efektif untuk mempertahankan anak-anak untuk bersekolah dibandingkan dengan SMP alternatif lainnya. Selain itu, SMP Satu Atap juga dianggap memberikan prospek kerja yang lebih baik bagi lulusannya. Dan akhirnya, SMP Satu Atap berkontribusi dalam usaha-usaha penghapusan pekerja anak dengan mencegah anak masuk dalam pekerjaan purnawaktu.

Rekomendasi. Terkait dengan dampak positif serta tantangan yang masih dihadapi oleh SMP Satu Atap, direkomendasikan untuk:

- Memperluas Program SMP Satu Atap
- Meningkatkan relevansi pendidikan dalam Program SMP Satu Atap
- Meningkatkan kualitas SMP Satu Atap dengan:
 - ◊ Menyediakan alat-alat dan kebutuhan sekolah
 - ◊ Merenovasi bangunan yang ada saat ini dan menyediakan bangunan baru
 - ◊ Meningkatkan kualitas guru: menyediakan pelatihan kompetensi, insentif yang lebih baik bagi guru, dll.
- Memaksimalkan SMP Satu Atap dalam upaya menghapuskan pekerja anak:
 - ◊ Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak agar tetap bersekolah (dan mendorong teman-teman serta keluarga mereka untuk masuk sekolah atau tetap bersekolah) dan mencegah mereka masuk dalam pekerjaan purna waktu, terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Hal ini dapat diintegrasikan dalam program regular seperti pelajaran ilmu sosial, pendidikan kewarganegaraan, dll.
 - ◊ Memaksimalkan peran Komite Sekolah terutama dalam menjangkau anak-anak putus sekolah di masyarakat dan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan dukungan masyarakat lebih luas.
- Menyelenggarakan penelitian/kajian lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa beberapa Program SMP Satu Atap dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam meningkatkan angka partisipasi dibandingkan dengan yang lainnya.
- Mendukung kegiatan-kegiatan akademis maupun non-akademis dalam SMP Satu Atap.

Perburuhan anak /pekerja anak diakui luas sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan-tujuan Pendidikan Bagi Semua dengan membatasi hak jutaan anak untuk mengakses dan menikmati pendidikan. Berbagai penelitian/kajian yang dilakukan untuk mencermati korelasi antara pekerja anak dan pendidikan menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara pekerja anak dan pendidikan di mana makin tinggi angka pekerja anak makin rendahlah tingkat pendidikannya. (Heady, C 2000; Guarcello, L *et.al.* 2005; ILO/IPEC-SIMPOC, 2007; Allais, F and Haggeman, F 2008). Francavilla *et.al.* (2003 in ILO/IPEC, 2007:7). Sebagai contoh, ditemukan bahwa anak-anak yang bekerja melakukan kegiatan ekonomi selama 28 jam per minggu atau lebih, angka kehadiran sekolahnya adalah sekitar setengah dari anak-anak yang melakukan kerja ringan. Lebih dari itu, dalam Guarcello *et.al.* (2005) penelitian di lima negara tentang dampak kerja yang dilakukan anak terhadap angka kehadiran serta prestasi sekolahnya, didapati bahwa pekerjaan yang dilakukan anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan anak untuk masuk sekolah atau tetap bersekolah. (Guarcello, L *et.al.* 2005).

Meskipun berbagai penelitian tentang pekerja anak kebanyakan sepakat bahwa perburuhan anak /pekerja anak memiliki dampak negatif terhadap pendidikan anak, tetapi sebab akibat antara dua determinan tersebut belum dapat dipastikan. Allais and Haggeman (2008), misalnya, menyatakan bahwa di daerah pedesaan pendorong utama di balik rendahnya angka kehadiran sekolah anak-anak kemungkinan bukanlah sekadar keterbatasan infrastruktur pendidikan itu sendiri tetapi juga karena kasus pekerja anak. Dalam hal ini, perburuhan anaklah yang menghalangi mereka untuk bersekolah dan oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berfokus pada pengurangan pekerja anak. Namun demikian, sebuah penelitian di Nepal, Peru, dan Zimbabwe oleh Ersado (2002 in ILO/IPEC, 2007:18) mendapati bahwa di daerah pedesaan, variabel-variabel di tingkat masyarakat terkait dengan infratraktur dan sekolah ternyata signifikan mempengaruhi keputusan untuk bersekolah dan bekerja - semakin banyak jumlah sekolah dalam masyarakat bersangkutan maka angka sekolahnya akan lebih tinggi dan angka bekerjanya lebih rendah, dan demikian sebaliknya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kurangnya akses pada sekolah dan rendahnya kualitas pendidikan dipandang sebagai faktor-faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan yang terwujud dalam peningkatan akses

sekolah dan kualitas pendidikan dapat mengakibatkan turunnya pekerja anak dan meningkatnya jumlah anak yang bersekolah.

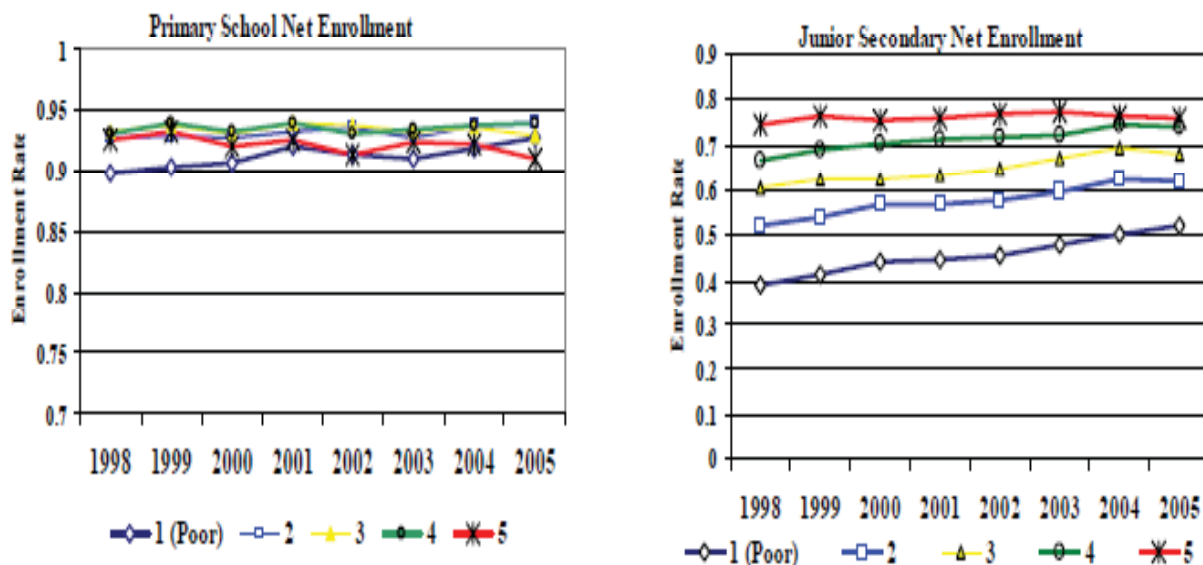
Bila pendapat ini diambil sebagaimana adanya, mungkin mudah untuk menerima argumentasi bahwa meningkatkan akses pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi dan dengan demikian akan membantu menghapuskan pekerja anak. Akan tetapi, Filmer (2004) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara angka masuk sekolah anak-anak usia 6 sampai 14 tahun dan jarak ke SD dan SMP di 21 daerah pedesaan di negara-negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa meskipun dari segi statistik keduanya saling berkaitan secara signifikan, tingkat keterkaitannya ternyata kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangkasan jarak besar-besaran hanya sedikit menimbulkan peningkatan angka rata-rata partisipasi sekolah. Oleh karena itu, meskipun peningkatan ketersediaan sekolah dengan memangkas jarak rata-rata bisa menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi, efeknya mungkin tidak substansial.

Meskipun dengan perdebatan seperti ini, pendekatan pendidikan universal diadopsi oleh banyak negara. Ini terjadi terutama karena pendidikan secara intrinsik dipandang baik sebagai cara membangun sumber daya manusia dan dibutuhkan oleh suatu negara untuk berkembang. Namun demikian, kiranya penting untuk mengevaluasi apakah upaya ini mencapai apa yang hendak dicapai, dan inilah yang menjadi sasaran studi kasus ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai Pendidikan Bagi Semua dan dalam upaya mencapai cita-cita Pendidikan Bagi Semua tersebut, Pemerintah Indonesia antara lain meluncurkan PROGRAM SEKOLAH SATU ATAP pada tahun 2005. Sekolah satu atap adalah SMP dengan tiga ruang kelas yang dibangun di tempat yang sama dengan sebuah SD. Apabila tidak tersedia dana untuk membangun ruang kelas baru, maka sekolah satu atap memakai gedung SD pada siang hari dan banyak sekolah satu atap juga mengkaryakan guru-guru SD untuk mengajar siswa-siswa SMP. SD dan SMP tersebut dapat dikelola oleh satu manajemen, atau oleh dua manajemen yang berbeda.

Strategi ini diambil untuk mengatasi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai sasaran pendidikan dasar universal yaitu masalah transisi antara SD ke SMP di mana penurunan angka partisipasi terbesar adalah antara SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Tren ini paling mencolok pada kelompok populasi miskin. Granado *et.al.* (2007) menemukan bahwa meskipun kelompok termiskin memiliki akses pada pendidikan dasar, mereka tertinggal di SMP dan pendidikan tinggi. Seorang anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan 20% lebih kecil untuk masuk ke sekolah menengah dibandingkan dengan anak bukan dari keluarga miskin. (lihat Gambar 2.1). Lebih dari itu, perbedaan-perbedaan regional tetap signifikan. Seperti terlihat dalam Tabel 2.1. , meskipun lebih dari 90 persen anak Indonesia memiliki akses ke sekolah dasar, beberapa wilayah ternyata tertinggal dalam jangka waktu lama. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni di Papua berkisar antara 76,09 persen dan di Aceh sekitar 96,95 persen. Di tingkat SMP, angka partisipasi murninya bervariasi, dari 49,03 persen di Papua Barat hingga sekitar 77,40 persen di Aceh. Akan tetapi, disparitas ini terjadi lebih besar lagi di dalam provinsi dan kabupaten tertentu daripada antar provinsi. Di Sukabumi, tempat studi kasus ini dilakukan misalnya, angka partisipasi murni tahun 2009-2010 di Kecamatan Cidolog hanya 39,10 persen sedangkan Kecamatan Bojong Genteng mencapai 118,50 persen (Dinas Pendidikan Sukabumi, 2011). Selain itu, banyak siswa putus sekolah sesudah memasuki SMP.

Gambar 2.1. Angka Masuk Sekolah berdasarkan Pendapatan – Pendidikan Dasar dan Menengah



Sumber: Perhitungan Bank Dunia dengan data pokok Susenas 2005 core data (dalam Granado, et. al. 2007)

Tabel 2.1. Angka Partisipasi Murni (NPM) menurut Provinsi, 2009

Provinsi	2009		
	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/MA/ Paket C
Aceh	96.95	77.40	62.12
Sumatera Utara	94.46	74.21	55.30
Sumatera Barat	94.75	67.61	54.50
R i a u	95.52	70.57	51.78
Kepulauan Riau	93.92	72.53	53.42
Jambi	95.05	66.42	44.71
Sumatera Selatan	93.61	65.86	43.01
Kep Bangka Belitung	92.52	53.10	38.13
Bengkulu	94.98	69.84	48.99
Lampung	94.79	69.17	41.43
DKI Jakarta	94.07	72.02	50.43
Jawa Barat	94.56	67.91	38.59
Banten	94.07	59.69	38.77
Jawa Tengah	95.63	69.67	44.53
Dista Yogyakarta	94.38	75.34	58.69
Jawa Timur	95.27	69.90	48.26
B a l i	94.99	67.38	56.48
Nusa Tenggara Barat	94.75	71.32	48.51
Nusa Tenggara Timur	92.46	50.21	34.15
Kalimantan Barat	93.96	55.45	36.40
Kalimantan Tengah	96.14	60.59	39.27
Kalimantan Selatan	94.49	60.56	35.71
Kalimantan Timur	93.74	72.06	53.10

Provinsi	2009		
	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/MA/ Paket C
Sulawesi Utara	91.90	66.69	50.46
Gorontalo	90.40	53.05	38.47
Sulawesi Tengah	92.98	60.22	39.52
Sulawesi Selatan	92.27	61.74	42.03
Sulawesi Barat	92.77	53.35	33.41
Sulawesi Tenggara	94.71	66.45	47.90
Maluku	94.38	71.48	59.58
Maluku Utara	93.39	65.49	51.74
Papua	76.09	49.08	35.77
Papua Barat	91.25	49.03	43.55
TOTAL	94.37	67.43	45.11

Sumber: Biro Pusat Statistik, Juni 2011

Weston (2008) menemukan bahwa alasan-alasan utama yang diberikan untuk tidak melanjutkan ke SMP atau putus sekolah adalah alasan ekonomi (lebih dari 70% siswa) yang menyebabkan keluarga tidak mampu membiayai transportasi ke SMP. Alasan ini dapat diterima karena banyak lulusan SD tinggal di daerah pelosok dan terpencil yang tidak memiliki SMP. Weston (2008) juga mencatat bahwa "perlu bekerja" banyak disebut sebagai salah satu alasan utama untuk tidak bersekolah. Namun demikian, hanya 20 persen dari mereka yang mengemukakan alasan "perlu bekerja" akhirnya benar-benar bekerja (Weston, 2008:3)

Program sekolah satu atap dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengakomodasi lebih banyak siswa dan dengan demikian mempercepat dicapainya program wajib belajar sembilan tahun dengan membuat sarana SMP dekat dengan lulusan-lulusan SD yang sebelumnya tidak terjangkau. SD dan SMP Satu Atap terutama didirikan di daerah-daerah pelosok dan terpencil di mana SMP terdekat tidak dapat dijangkau karena alasan-alasan geografis dan jarak. Prioritas diberikan pada daerah-daerah dengan angka partisipasi kasar yang rendah tetapi masyarakatnya memiliki minat besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Berdasarkan data tahun 2007, terdapat 2.155 satu atap di seluruh Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji apakah, dalam kasus Sukabumi, anak-anak akhirnya melanjutkan sekolah bila hambatan-hambatan biaya sekolah disingkirkan dengan SMP Satu Atap. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisa apakah kehadiran SMP Satu Atap ikut berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak. Penelitian ini juga mencari cara-cara yang dapat meningkatkan sumbangan sekolah satu atap dalam mengurangi pekerja anak.

Metodologi Penilaian Dampak

3.1. Metodologi

Untuk mencapai tujuan-tujuan penilaian dampak, penelitian ini terutama bersandar pada kajian pustaka, wawancara mendalam dengan nara sumber utama dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk mengumpulkan data serta informasi kualitatif yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, dilakukan satu FGD dengan sembilan kepala sekolah SMP Satu Atap, tiga FGD dengan para guru, orang tua dan siswa di tiga sekolah terpilih, serta satu wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pendidikan Sukabumi. Orang tua dan anak-anak dipilih secara acak dari sekolah satu atap tempat FGD dilaksanakan. Sekolah-sekolah tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan keragaman kualitasnya. Selain itu, dilakukan enam wawancara dengan anak-anak putus sekolah. Enam wawancara tersebut dirancang mewakili anak laki-laki dan perempuan dengan jumlah setara. Namun demikian, banyak anak perempuan yang takut diwawancarai sehingga hanya dua dari enam anak tersebut adalah perempuan.

Untuk menolong peserta anak-anak dalam menjelaskan kegiatan sehari-hari mereka secara terperinci, penelitian ini juga menggunakan alat dari Trainers' Kit on Rights, Responsibilities, and Representation (3-R) yang dikembangkan ILO, sebuah diagram kegiatan anak selama 24 jam. Dengan menggunakan alat ini anak-anak diminta untuk mewarnai diagram sesuai dengan kegiatan mereka dan menjelaskan kegiatan mereka secara terperinci kepada seluruh kelas.

3.2. Kualitas Data

Sumber data dapat ditemukan di bawah setiap tabel dan graphic dalam laporan penelitian ini. Meskipun penelitian ini utamanya menjelaskan informasi kualitatif dari informan-informan utama, tapi bilamana dimungkinkan maka data kualitatif juga diberikan untuk mendukung analisisnya. Banyak data kualitatif berasal dari Dinas Pendidikan Sukabumi. Akan tetapi, ada beberapa kesulitan dengan data populasi yang digunakan untuk menghitung angka masuk sekolah. Dan oleh karena itu, seperti diinformasikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten, data di beberapa daerah mungkin di atas prakiraan sedangkan di wilayah lain di bawah prakiraan. Hal ini juga tercermin dalam, misalnya, angka Partisipasi Murni di

sejumlah kecamatan yang mencapai 100 persen lebih. Hal ini diasumsikan akibat adanya banyak orang dari daerah lain di kecamatan-kecamatan tersebut tetapi belum tercatat sebagai penduduk (berdasarkan KTP).

3.3. Definisi

Dalam mendefinisikan perburuan anak/pekerja anak, penelitian ini merujuk pada peraturan nasional serta definisi perburuan anak/pekerja anak yang diberikan oleh ILO, yaitu, "suatu pekerjaan yang mengakibatkan anak kehilangan masa kanak-kanak, potensi dan martabat mereka, dan yang membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka". Secara khusus, perburuan anak merujuk pada pekerjaan yang:

- Secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya bagi anak-anak; dan
- Mengganggu sekolah mereka dengan:
 - ◊ Menghilangkan kesempatan untuk bersekolah;
 - ◊ Memaksa mereka berhenti sekolah sebelum saatnya; atau
 - ◊ Menuntut mereka untuk bersekolah sambil bekerja kerja keras dalam waktu yang panjang

Selain ini, ILO juga memberikan panduan spesifik mengenai usia minimum bagi anak-anak untuk diperbolehkan bekerja sesuai dengan Konvensi Usia Minimum No. 138 (lihat tabel 3.1). Di samping itu, melalui Undang-Undang no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia memberikan peraturan yang lebih terperinci mengenai isu pekerja anak. Dalam pasal 68, undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun (dalam BPS dan ILO: 2009). Akan tetapi, undang-undang ini memberikan perkecualian untuk mempekerjakan anak-anak usia 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, hingga tiga jam per hari dengan izin orang tua dan pekerjaan tersebut tidak mengganggu sekolah anak dan tidak membahayakan perkembangan fisik, mental, atau sosial anak (pasal 26, 68,69 dalam BPS dan ILO 2009). Dalam pasal 74, undang-undang ini juga melarang siapa pun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak, seperti praktek-praktek perbudakan atau yang seperti perbudakan ; pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk prostitusi, pornografi atau perjudian; pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman beralkohol, narkotika, atau zat-zat psikotropika; dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak (dalam BPS dan ILO 2009).

4.

SMP Satu Atap di Sukabumi: Ikhtisar

Sukabumi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dikenal memiliki risiko *trafficking* dan perburuan anak untuk pekerja rumah tangga. Meskipun angka partisipasi kasar² untuk tingkat SMP di Kabupaten Sukabumi mencapai 107,05%, beberapa kecamatannya memiliki angka partisipasi yang lebih rendah seperti misalnya Kecamatan Cimanggu (65,8%) dan Kecamatan Sukabumi³ (55,3%).

Seperti lazimnya, SMP Satu Atap di Sukabumi dibangun di daerah terpencil di mana masyarakatnya tinggal tersebar dan umumnya di wilayah di mana tingkat kemiskinannya tinggi tapi memiliki kebutuhan signifikan akan sekolah, sebagai ditunjukkan oleh jumlah siswa yang berpotensi di daerah tersebut. Di Kabupaten Sukabumi, seluruhnya terdapat 19 SMP Satu Atap yang beroperasi di 14 Kecamatan. SMP Satu Atap pertama kali dibangun pada tahun 2006. Pada tahun ajaran 2010-2011 kurang lebih ada 2003 siswa yang mendaftar ke SMP Satu Atap. Tabel 4.1 di bawah memberikan rincian SMP Satu Atap yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi merencanakan untuk membangun empat SMP Satu Atap dan saat penelitian ini dilaksanakan rencana tersebut sudah sampai pada tahap verifikasi. Di samping itu, tiga SMP Satu Atap direncanakan akan dibangun pada tahun 2012.

SMP Satu Atap dikelola oleh manajemen SMP bekerja sama dengan manajemen SD yang tercermin dalam struktur organisasi sekolah di mana Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolahnya harus berasal dari SD tempat SMP Satu Atap tersebut berada. Pengajar sekolah satu atap adalah guru-guru honorer dan guru-guru dari SD tempat SMP Satu Atap dibangun.

Selama tahun pertama, SMP Satu Atap didanai dari APBN. Sesudah tahun pertama, tanggung jawab pembiayaan SMP Satu Atap dialihkan pada pemerintah daerah (melalui Bantuan Operasional Sekolah/BOS daerah) yang terutama untuk tunjangan guru dan juga pada pemerintah pusat melalui BOS nasional.

2 Ratio bersekolah kasar /Gross enrollment ratio (GER) adalah ratio siswa, tanpa memperhitungkan usia, yang masuk sekolah di tingkat pendidikan tertentu dengan populasi total suatu kelompok usia untuk tingkat pendidikan tertentu. Di Indonesia, kelompok usia untuk SMP adalah 12 sampai 15 tahun. Pada kenyataannya banyak anak di atas 15 tahun masih bersekolah di SMP.

3 Lazim terjadi di Indonesia bahwa suatu kecamatan memiliki nama yang sama dengan nama kabupaten di mana kecamatan itu berada. Kabupaten Sukabumi terdiri dari beberapa kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Sukabumi.

Menurut Pedoman BOS (Kemendiknas, 2006), Dana BOS dapat digunakan untuk biaya-biaya operasional yang berkaitan dengan:

- Registrasi /penerimaan siswa baru
- Buku teks dan buku referensi
- Alat tulis dan kebutuhan sehari-hari sekolah
- Program pengajaran remedial, olah raga, seni
- Biaya ujian sekolah dan rapor siswa
- Pengembangan dan pelatihan guru
- Perbaikan dan perawatan gedung sekolah
- Listrik, air, telepon
- Honor guru
- Biaya transport untuk siswa miskin
- Peralatan agama dan fasilitas asrama
- Biaya operasional program BOS
- Bila dana BOS sudah digunakan untuk semua komponen di atas, maka dana yang tersisa dapat digunakan untuk membeli peralatan olah raga, bahan ajar, perabot.

SMP Satu Atap menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah bersangkutan.

Tabel 4.1. Daftar SMP Satu Atap di Kabupaten Sukabumi

Kecamatan	Nama SMP Secondary School	Tahun Pendirian	Jumlah Guru	Ruang Kelas	Jumlah Siswa/Siswi per Tahun Ajaran			
					2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011
Cibitung	Cikamarang	2008	21	4	N/A	N/A	N/A	143
Ciemas	Sanggarawa	2007	11	3	N/A	N/A	N/A	96
Cikakak	Cihangasa	2008	7	3	N/A	N/A	N/A	80
	Cihaur	2010	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	187
Cikembar	Sampalan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ciracap	Cigelang	2008	N/A	3	N/A	N/A	N/A	53
Cisolok	Cimapag	2008	10	3	N/A	N/A	N/A	51
Curugkembar	Babakan Mindi	2008	9	3	44	86	112	100
Jampangkulon	Karang Anyar	2006	18	6	N/A	N/A	N/A	247
Kalibunduer	Buniwangi	2008	10	4	N/A	N/A	N/A	124

Kecamatan	Nama SMP Secondary School	Tahun Pendirian	Jumlah Guru	Ruang Kelas	Jumlah Siswa/Siswi per Tahun Ajaran			
					2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011
Sagaranten	Margawati	2008	12	5	N/A	N/A	N/A	161
Simpenan	Mekar Asih	2008	19	5	N/A	N/A	N/A	168
Surade	Cijambe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sukatani	N/A	14	3	24	74	96	120
	Pasirmalang	N/A	9	2	N/A	N/A	N/A	53
Tegalbuleud	Cikaso	2008	14	3	N/A	N/A	N/A	121
	Karang Anyar	2007	17	6	22	88	150	168
	Cikadu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Waluran	Cibinong	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2011

4.1. Masyarakat

4.1.1. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Kebanyakan orang tua bekerja sebagai buruh tani lepas karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Akan tetapi, ada sebagian dari mereka yang selain bekerja sebagai buruh tani juga memiliki lahan dengan hasil sekitar 5 kuintal beras setiap panen. Dari bekerja sebagai buruh mereka memperoleh pendapatan sekitar Rp. 15.000 sampai 25.000 per hari. Namun demikian, tidak setiap hari mereka bisa mendapatkan pekerjaan, kadang kala dalam satu bulan mereka hanya bekerja sepuluh hari saja. Secara rata-rata, dari kerja lepas itu mereka menerima antara Rp. 1.800.000 sampai Rp. 3.000.000 per tahun. Sementara mereka yang memiliki lahan sendiri dapat memperoleh pendapatan tambahan sekitar Rp. 2.100.000 hingga Rp. 2.800.000 per tahun. Dengan demikian, kisaran pendapatan bulanan kebanyakan orang tua (mereka yang tidak memiliki lahan sendiri) kurang lebih antara Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000. Sejumlah kecil orang tua perempuan melakukan kerja lepas sebagai penjahit tetapi pendapatan mereka tidak signifikan, kurang lebih sama seperti buruh tani. Pendapatan ini digunakan untuk menutup kebutuhan seluruh keluarga dengan jumlah anggota yang beragam, antara empat sampai sepuluh orang. Dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2011 adalah Rp. 228.401 per kapita per bulan (BPS Jawa Barat 2011 dalam Rachmat, Y. 2011), maka mayoritas keluarga dalam SMP Satu Atap berada di bawah garis kemiskinan.

Kurangnya kesempatan kerja bagi orang dewasa juga mengakibatkan kurangnya kesempatan kerja bagi anak-anak di wilayah ini. Di daerah di mana SMP Satu Atap didirikan, satu-satunya sektor potensial bagi pekerja anak adalah pertanian dan mereka biasanya bekerja sebagai buruh lepas untuk pertanian milik rumah tangga lain, menyadap nira, menyadap karet, dll. Akan tetapi, kesempatan kerja di kota sebagai pekerja rumah tangga dan buruh pabrik juga dianggap sebagai sektor potensial yang dapat menarik anak-anak.

4.1.2. Pandangan tentang Pentingnya Pendidikan

Dari sepuluh FGD yang dilakukan dalam penelitian ini (Satu FGD dengan Kepala Sekolah Satu Atap, tiga dengan guru, tiga dengan siswa, tiga dengan orang tua di tiga sekolah satu atap) ditemukan adanya berbagai pendapat yang saling bertentangan tentang bagaimana masyarakat memandang pentingnya pendidikan di daerah SMP Satu Atap. Sementara orangtua dan anak yang berpartisipasi dalam FGD memperlihatkan pandangan sangat positif mengenai pentingnya pendidikan, para Kepala Sekolah dan Guru justru berpendapat sebaliknya.

Para orang tua, misalnya, seluruhnya mengakui bahwa mereka lebih suka anak-anak mereka melanjutkan sekolah daripada bekerja, dengan harapan agar anak-anak dapat memiliki masa depan dan pekerjaan yang lebih baik dari pada mereka sendiri. Akan tetapi, sejumlah orang tua mengizinkan anak-anak bekerja membantu mereka, misalnya untuk mengurus ternak tiga kali seminggu, atau membantu mereka di sawah (sesudah sekolah selama 2-3 hari atau pada akhir pekan, 2-3 setahun) ketika beban kerja sedang tinggi, tapi hanya bila pekerjaan tersebut tidak mengganggu pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa orang tua menempatkan pendidikan anak-anak mereka pada prioritas yang tinggi dan bahwa mereka memandang pendidikan sebagai faktor penting yang dapat membentuk masa depan anak-anak.

Anak-anak tersebut juga mengungkapkan pendapat yang sama. Mereka lebih suka meneruskan pendidikan daripada bekerja karena hal-hal yang dijanjikan oleh pendidikan bagi masa depan mereka. Mereka, misalnya, membandingkan apa yang dapat diraih oleh lulusan SD – bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pengangguran – dengan apa yang dapat dilakukan oleh lulusan SMP Satu Atap, seperti bekerja di pabrik, dan apa yang dapat dilakukan oleh lulusan Universitas– menjadi dokter, pilot, pengusaha, dll. Bahkan ketika ditanya apakah mereka mau bekerja paruh waktu bila ada kesempatan, ternyata 33% dari siswa peserta tidak ingin melakukannya sementara 33% akan mempertimbangkannya bila pekerjaan itu hanya memakan waktu 1-2 jam saja dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan sekolah.

Namun demikian, para Kepala Sekolah dan guru memiliki beragam pandangan yang saling bertentangan mengenai hal ini. Dalam satu kesempatan mereka mengakui bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendorong anak-anak untuk bersekolah. Akan tetapi, mereka juga mengakui bahwa salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah kurangnya motivasi dari anak-anak itu sendiri, yang mereka anggap sebagai akibat pandangan negatif terhadap pentingnya pendidikan serta kurangnya dukungan orang tua yang tidak melihat pendidikan sebagai faktor penting bagi perkembangan dan masa depan anak. Keterlibatan orang tua dalam membimbing anak-anak dalam pendidikan juga sangat minim karena rendahnya pendidikan mereka sendiri. Situasi ini juga diakui oleh para orang tua yang, meskipun mendorong anak mereka untuk meneruskan pendidikan, tidak mampu berbuat banyak dalam mendukung pendidikan mereka. Sebagai contoh, mereka tidak tahu menahu apa yang dipelajari anak dan tidak pernah memeriksa pekerjaan rumah mereka.

Mempertimbangkan cerita dari kedua sisi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya anak maupun orang tua mungkin memiliki pandangan positif terhadap pentingnya pendidikan. Orang tua dan anak-anak mungkin benar-benar melihat arti penting pendidikan seperti dicerminkan dalam FGD dengan orang tua serta anak-anak. Namun demikian, pandangan positif ini tidak otomatis terwujud dalam tindakan atau dukungan nyata karena latar belakang dan kurangnya pendidikan orang tua menjadi penghambat utama untuk secara langsung terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, kurangnya dukungan dan bimbingan nyata dari orang tua juga bisa memberikan dampak besar pada prestasi anak di sekolah.

4.1.3 Alasan-alasan untuk memilih SMP Satu Atap

Ketika ditanya tentang alasan-alasan di balik keputusan mereka untuk meneruskan sekolah di SMP Satu Atap, baik anak-anak maupun orang tua beralasan bahwa SMP Satu Atap relatif dekat dengan rumah mereka dibanding dengan SMP biasa, selain juga menawarkan pendidikan gratis. Di samping itu, orang tua maupun anak melihat bahwa pendidikan SMP akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi lulusannya. Beberapa peserta juga mempertimbangkan reputasi positif sekolah tersebut. Hal ini khususnya terjadi pada SMP Satu Atap Margawati di Kecamatan Sagaranten yang memiliki reputasi baik di bidang olah raga maupun akademis.

Faktor-faktor ini bukan saja memainkan peran signifikan di balik keputusan orang tua dan siswa untuk melanjutkan sekolah ke SMA, tetapi juga dianggap sebagai hal-hal paling positif dari keberadaan Sekolah Satu Atap. Ketika ditanya apa yang mereka sukai dari SMP Satu Atap, siswa maupun orang tua mengulangi kembali jawaban mereka terdahulu mengenai alasan-alasan memilih melanjutkan sekolah di SMP Satu Atap.

4.2. Tantangan, Kualitas dan Apa yang Harus Dilakukan di SMP Satu Atap

4.2.1. Tantangan

Pendanaan:

Tantangan utama bagi operasional SMP Satu Atap adalah kurangnya dana. Situasi ini antara lain menimbulkan berbagai tantangan dalam hal:

- Gedung dan fasilitas sekolah: Kurangnya fasilitas gedung seperti air dan sanitasi, ruang guru, perpustakaan, ruang kelas atau lapangan untuk kegiatan olah raga, dll.
- Kesejahteraan dan kualitas guru: karena peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang membatasi anggaran pendidikan sampai 20% dari Anggaran maka beberapa daerah, seperti Sukabumi, menghadapi masalah besar dalam mendanai program pendidikan. Hal ini, antara lain, tercermin dalam pemotongan gaji guru per jam. Menurut peserta, sekalipun sudah menjadi pegawai negeri, pendapatan guru umumnya lebih rendah daripada pekerja dan pegawai negeri lain dengan tingkat pendidikan setara. Kompensasi untuk guru-guru yang bekerja di daerah terpencil juga dianggap tidak memadai. Sebagai contoh, guru PNS di Sukabumi hanya menerima kompensasi sebesar Rp. 1.200.000 per tahun untuk mengajar di sekolah pelosok. Banyak peserta menganggap bahwa tambahan ini tidak berarti dibanding dengan tantangan dan pengeluaran tambahan yang harus mereka hadapi. Selain itu, menurut pejabat-pejabat dinas pendidikan, banyak guru, bahkan guru PNS sering mengeluhkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan PNS lain. Meskipun selisih upahnya kecil bila diperhitungkan dari pendapatan per jam, guru cenderung memperoleh pendapatan lebih rendah dari pada rekan-rekan lain sesama PNS. Guru SMP Satu Atap yang kebanyakan adalah guru honorer/kontrak dengan upah dinegosiasikan di tingkat sekolah/kecamatan berdasarkan anggaran yang tersedia juga mengakibatkan disparitas, bahkan antar sesama guru. Gaji rata-rata yang diterima oleh guru SMP Satu Atap berkisar antara Rp. 5.000 sampai Rp.8.000 / jam. Bagi kebanyakan guru, pengurangan ini menyulitkan mereka untuk tetap

mempertahankan motivasi, apalagi bila honor mengajar mereka nyaris tidak bisa menutup ongkos transportasi dari dan ke sekolah. Banyak guru tetap mengajar di SMP Satu Atap karena mereka butuh pengalaman mengajar. Banyak dari guru honorer tersebut adalah mahasiswa jurusan pendidikan yang disyaratkan untuk praktek mengajar sebagai bagian dari kuliah mereka. Beberapa guru adalah mereka yang gagal dalam seleksi mengajar di SMP reguler dan karenanya memerlukan pengalaman mengajar di sekolah satu atap untuk meningkatkan daya saing. Mengingat situasi ini, cukup sulit untuk mengharapkan komitmen jangka panjang dari guru-guru tersebut karena kebanyakan akan meninggalkan sekolah begitu mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

- Kurangnya peralatan dan perlengkapan sekolah: karena kurangnya dana, banyak SMP Satu Atap bahkan tidak mampu membeli buku-buku yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mengajar di sekolah. Banyak guru harus *mengcopy* buku sendiri. Kebanyakan siswa tidak memiliki buku sendiri, oleh karena itu mereka hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru dalam belajar.

Manajemen:

Karena inisiatif pendirian SMP Satu Atap biasanya berasal dari guru-guru SD, maka ada rasa kepemilikan yang kuat di kalangan guru SD tempat SMP Satu Atap dibangun. Hal ini kerap kali menimbulkan ketidakselarasan antara Kepala Sekolah yang baru dengan guru-guru SD tersebut. Sangatlah dianjurkan untuk meminimalkan tantangan ini melalui kolaborasi antara kepala sekolah baru dengan kepala SD bersangkutan. Koordinasi dan hubungan antara guru dan kepala sekolah dianggap sangat baik, meskipun kepala sekolah seringkali menghadapi pilihan sulit antara mendukung guru-guru mereka atau mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan partisipasi siswa. Ini seringkali menjadi sumber konflik antara guru dengan kepala sekolah.

Guru:

Dari segi jumlah, seluruh SMP Satu Atap sudah memiliki lebih dari enam guru, yaitu jumlah minimal yang disyaratkan dalam pedoman mendirikan SD-SMP Satu Atap (Kemendiknas, 2007). Namun demikian, dari segi kualitas, para guru tersebut masih memiliki kualifikasi di bawah yang disyaratkan, karena banyak guru SMP Satu Atap adalah guru SD yang pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar di tingkat SMP. Meskipun kelemahan ini sudah ditambal dengan merekrut guru honorer, tetapi dalam banyak kasus guru-guru honorer itu sendiri belum memiliki ijazah minimum untuk mengajar karena banyak di antaranya masih kuliah. Selain itu, lazim terjadi ketidakcocokan antara kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang mereka ajar. Sebagai contoh, seorang guru dengan kualifikasi mengajar PKN bisa jadi diminta untuk mengajar matematika. Tantangan seperti ini juga dikemukakan oleh Pejabat Dinas Pendidikan yang berpendapat bahwa merekrut guru untuk SMP Satu Atap merupakan suatu tantangan karena masalah geografisnya dan karena itu kebanyakan SMP Satu Atap banyak mengandalkan guru-guru SD serta guru-guru honorer. Sekalipun ketika sekolah akhirnya mampu merekrut guru honorer, mereka tidak memiliki banyak wewenang untuk mendisiplinkan mereka. Hal ini mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran. Di antara enam guru, ada sekitar satu orang yang sering absen. Lebih dari itu, karena kurangnya dana, kecamatan hanya mampu memberikan pelatihan kompetensi kepada 20% dari seluruh guru yang direncanakan untuk mengajar di SMP Satu Atap. Akhirnya, komitmen guru untuk memberikan pendidikan berkualitas serta meneruskan pelayanan di SMP Satu Atap juga dianggap relatif rendah, terutama disebabkan oleh faktor geografis: sekolah tersebut terletak di daerah pelosok dan kebanyakan guru bukan berasal dari daerah SMP Satu Atap.

Siswa:

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah SMP Satu Atap antara lain adalah:

- **Angka kehadiran Siswa:**

Meskipun angka putus sekolah /drop-out di SMP Satu Atap hampir setara dengan SMP reguler, angka mangkirnya relatif lebih tinggi, yaitu mencapai 10% dalam satu tahun ajaran, karena beberapa alasan seperti:

- ◇ Musim hujan. Pada musim hujan, banyak siswa tidak dapat hadir pada waktunya karena jalan yang becek berlumpur, bahkan sejumlah siswa sama sekali tidak dapat hadir karena sungai meluap dan menutup jalan.
- ◇ Jarak dari dan ke sekolah. Meskipun Sekolah Satu Atap dibangun untuk memperpendek jarak yang harus ditempuh siswa dari/ke sekolah, banyak siswa Sekolah Satu Atap tinggal di daerah yang berjarak 3km lebih dari sekolah, sehingga banyak di antara mereka yang datang terlambat atau sama sekali mangkir saat musim penghujan.
- ◇ Banyak pula siswa yang terlambat karena mereka harus membantu orang tua melakukan tugas-tugas rumah tangga atau bekerja mengambil nira kelapa, sebelum berangkat ke sekolah.
- ◇ Pada musim panen, yang bisa terjadi 2-3 kali per tahun, sekitar 50% siswa tidak bersekolah selama 2-3 hari untuk membantu orang tua mengasuh adik-adik mereka atau malah terlibat langsung dalam pekerjaan pertanian yang tersedia untuk anak-anak selama musim tersebut.

- **Motivasi siswa:**

Para guru dan kepala sekolah sama-sama mengungkapkan keprihatinan mengenai rendahnya motivasi serta perhatian siswa di dalam kelas. Kurangnya motivasi ini disebabkan oleh beragam alasan seperti:

- ◇ Masalah di rumah (pekerjaan rumah tangga, kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga)
- ◇ Masalah dengan teman
- ◇ Kekurangan gizi
- ◇ Kurangnya keterlibatan dan bimbingan dari orang tua. Sebagian anak-anak tinggal bersama kakek-nenek karena orang tua mereka bekerja di luar negeri (di Saudi) atau bekerja di kota. Ini menjadikan siswa cenderung tidak disiplin dan kurang memperhatikan kegiatan belajar di kelas.
- ◇ Kurangnya sarana pendukung. Sebagai contoh: karena tidak ada komputer di sekolah, ketika siswa diperkenalkan pada pelajaran komputer, mereka hanya dapat mempelajari teorinya dan membayangkan seperti apa komputer itu dan bagaimana mengoperasikannya.
- ◇ Pengaruh negatif dari pihak lain terutama dari anak-anak putus sekolah dan mereka yang sudah bekerja di kota. Pengaruh ini sering membuat siswa melalaikan tanggung jawab sekolah.

Dukungan Masyarakat,

Sejak program SMP Satu Atap dimulai, dukungan masyarakat dianggap terus meningkat. Hal ini terutama terlihat dari perubahan perilaku orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat. Di awal program, banyak orang tua mengusulkan agar kegiatan sekolah dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, mereka mengharapkan agar di musim panen sekolah dimulai pada siang hari sehingga

anak-anak dapat membantu mereka di sawah. Sikap ini tidak lagi muncul dan orang tua bahkan mengizinkan anak-anak tinggal di sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, di salah satu kecamatan ada hambatan dari tokoh masyarakat ketika program dimulai, tetapi saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi dan tokoh masyarakat justru terlibat aktif dalam mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Komite sekolah yang mewakili masyarakat masih terperangkap dalam peran tradisional mereka: menghadiri pertemuan di penghujung pendaftaran untuk diberi informasi tentang peraturan dan kegiatan sekolah, kemudian mengadakan pertemuan di akhir tahun ajaran untuk membahas kelulusan siswa. Dari sembilan kepala sekolah yang mengikuti FGD, hanya ada satu yang mengakui adanya peran aktif komite sekolahnya. Ini sebagian besar disebabkan oleh keterlibatan aktif ketua komite sekolah yang juga terlibat aktif dalam mendorong anak-anak untuk meneruskan atau tetap bersekolah di SMP Satu Atap.

Lokasi

Sesuai lazimnya, SMP Satu Atap dibangun di daerah terpencil. Lokasi seperti ini menimbulkan berbagai tantangan bagi para guru maupun siswa. Selama musim hujan, misalnya, sejumlah sekolah tidak dapat diakses. Lokasi yang terpencil juga meningkatkan biaya transport bagi anak-anak maupun guru. Sekitar 10% dari siswa tidak melanjutkan penididikannya di SMP Satu Atap karena jarak rumah mereka ke sekolah.

4.2.2. Kualitas

Selama penelitian, kebanyakan peserta mengungkapkan bahwa tantangan yang mereka hadapi itu mempengaruhi kualitas SMP Satu Atap. Peserta FGD mengakui bahwa dari segi kualitas, SMP Satu Atap secara umum masih ketinggalan jauh dari SMP reguler. Pandangan mengenai rendahnya kualitas sekolah ini juga tercermin dalam tingkat kepuasan anak-anak. Meskipun orang tua cenderung puas dengan

SMP Satu Atap, hal itu kebanyakan dikarenakan sekolah ini gratis dan dekat dengan rumah, sedangkan anak-anak masih merasa tidak puas karena mutu pendidikan yang diberikan. Siswa juga khawatir bahwa pelajaran yang mereka terima di SMP Satu Atap tidak cukup mempersiapkan mereka untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi bila mereka berniat melanjutkan ke SMA. Selain itu, mereka juga merasa tidak puas karena:

- Kurangnya sarana sekolah sampai-sampai pelajaran bisa dibatalkan ketika hujan,
- Tidak ada cukup meja belajar sehingga satu meja digunakan oleh tiga siswa,
- Guru-guru sering mangkir
- Kurangnya buku ajar sehingga tidak ada seorang siswa pun yang memiliki buku teks sendiri
- Tidak ada fasilitas olah raga atau lapangan yang dapat digunakan untuk berolah raga atau sekadar bermain bersama teman sesudah sekolah

Kurangnya sarana sekolah, kurangnya guru yang berkualitas, tingginya tingkat mangkir guru, dan tidak memadainya materi pendukung dipandang sebagai faktor-faktor utama yang menurunkan kualitas SMP Satu Atap. Faktor-faktor ini menyulitkan guru dalam menyampaikan pelajaran untuk memastikan siswa

mendapatkan pemahaman mendalam sesuai tuntutan kurikulum. Di samping itu, kurangnya buku-buku dan tidak adanya perpustakaan yang memadai turut membatasi peluang anak untuk belajar secara mandiri di luar jam sekolah. Dengan demikian, waktu belajar dan kesempatan siswa untuk memperoleh pemahaman pelajaran sekolah secara mendalam praktis tergantung pada waktu belajar di sekolah dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Akhirnya, bangunan sekolah yang kurang memadai juga mengganggu pengalaman belajar siswa. Seperti diungkapkan oleh peserta, siswa kerap kali tidak dapat berkonsentrasi di kelas terutama saat musim penghujan karena air hujan masuk ke dalam kelas.

Namun demikian, di antara tantangan-tantangan tersebut, ketidakhadiran siswa dan fakta bahwa banyak anak yang bekerja dianggap tidak signifikan terhadap kualitas SMP Satu Atap, terutama dalam prestasi akademis. Hal ini disebabkan karena para guru memastikan bahwa mereka yang absen masih bisa mengejar ketinggalan dengan, misalnya, meminjam catatan dari siswa lain. Oleh karena itu, meskipun mungkin ada sejumlah perbedaan dari segi "masukan" proses belajar (misalnya, kehadiran yang teratur, kelelahan, dll), tetapi hanya ada sedikit perbedaan dalam keluaran (prestasi akademis) antara mereka yang sering absen dan yang tidak. Dengan kata lain, temuan kualitatif ini menyiratkan bahwa anak-anak bekerja menunjukkan tingkat prestasi yang setara dengan rekan-rekannya yang tidak bekerja meskipun mereka mengalami banyak kesulitan untuk hadir secara teratur dan/atau kelelahan saat pelajaran. Hal ini mungkin pula dikarenakan waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan ekonomi masih terkategori kerja ringan, di mana anak-anak usia 13-15 tahun bekerja tidak lebih dari 15 jam per minggu.

Meskipun ketinggalan dalam prestasi akademis, kualitas SMP Satu Atap dalam kegiatan non-akademis diakui tidak ketinggalan dari SMP reguler. Banyak SMP Satu Atap menunjukkan prestasi yang baik di bidang olah raga dan kegiatan seni/budaya. SMP Satu Atap Margawati, misalnya, sering menjadi juara dalam kejuaraan daerah bola voli dan terkenal prestasinya di bidang olah raga. Selain itu, dalam hal tingkah laku dan etika, siswa-siswa SMP Satu Atap menunjukkan kualitas yang sama, bila tidak lebih baik, dibandingkan dengan siswa-siswa SMP biasa.

4.2.3. Apa yang Harus Dilakukan

Mengenai rendahnya mutu SMP Satu Atap, peserta juga mengidentifikasi berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Gagasan-gagasan itu antara lain adalah:

- Meningkatkan relevansi pendidikan dengan menyediakan pengajaran *life skill* dan keterampilan *pre-vocational*. Kebanyakan siswa SMP Satu Atap berasal dari keluarga miskin dan mereka mungkin tidak mampu meneruskan pendidikan ke SMA atau SMK. Banyak di antara mereka akan memasuki dunia kerja, seperti bekerja di pabrik atau perkebunan, selepas dari SMP. SMP Satu Atap akan lebih menarik bila memberikan keterampilan-keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa.
- Menyediakan peralatan dan perlengkapan sekolah seperti: komputer, buku teks, alat-alat olah raga, dll.
- Merenovasi gedung yang ada dan menyediakan sarana baru seperti toilet, perpustakaan, ruang guru, dll.
- Memberikan insentif yang lebih baik untuk guru
- Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan perekrutan guru PNS dari daerah tempat SMP Satu Atap berada

- Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan guna meningkatkan dukungan masyarakat.

Di bagian ini kita akan mencermati apakah dan bagaimana SMP Satu Atap mempengaruhi keputusan orang tua dan anak-anak mereka untuk meneruskan pendidikan ke sekolah menengah, dan bagaimana ini bisa mengubah tren meneruskan pendidikan dari SD ke SMP di daerah tempat SMP Satu Atap didirikan. Kita juga akan melihat apakah perubahan ini juga tercermin dalam Angka Partisipasi Murni di daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat apakah SMP Satu Atap mampu mempertahankan siswa untuk tetap bersekolah dengan mempertimbangkan angka drop-outnya. Selain itu, kita juga akan mengamati apakah SMP Satu Atap dianggap meningkatkan prospek kerja para lulusannya. Terakhir, kita akan memeriksa apakah kehadirannya telah secara signifikan mengubah kegiatan anak-anak di wilayah tersebut.

5.1. Peran SMP Satu Atap pada Keputusan Orang tua dan Anak untuk Melanjutkan Pendidikan ke SMP

Didirikannya SMP Satu Atap sangatlah penting dalam mempengaruhi keputusan orang tua dan anak-anak untuk meneruskan pendidikan ke SMP. Hal ini diperlihatkan oleh jawaban anak-anak maupun orang tua mereka ketika ditanya tentang alasan mereka untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Seluruh peserta menyebutkan bahwa didirikannya SMP Satu Atap dalam jarak yang memadai dari rumah mereka dan sekolah gratis menjadi alasan utama. Selain itu, ketika ditanya apakah yang mereka lakukan seandainya tidak ada SMP Satu Atap di daerah mereka, para siswa - khususnya dari SMP Satu Atap Sukatani dan Karang Anyar – memberikan jawaban yang lebih optimis. Dari 33 siswa yang berperan serta dalam penelitian, 16 siswa optimis bahwa mereka tetap bisa meneruskan ke SMP sekalipun tidak ada SMP Satu Atap di daerah mereka. Mereka akan tinggal dengan kerabat di dekat SMP reguler, berjalan kaki sejauh satu jam, atau menyewa kamar di dekat sekolah. Akan tetapi, 12 siswa, termasuk seluruh siswa peserta dari SMP Satu Atap Margawati, menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu meneruskan ke SMP seandainya tidak ada SMP Satu Atap di wilayah mereka. Bagi mereka, tidaklah mungkin untuk bersekolah di SMP

reguler terdekat karena jarak dan biayanya. Anak-anak ini berpendapat bahwa seandainya tidak ada SMP Satu Atap mereka tentu sudah bekerja sebagai buruh tani membantu orang tua atau menganggur. Lima peserta yang tersisa tidak tahu apakah mereka akan mampu meneruskan pendidikan ke SMP seandainya tidak ada SMP Satu Atap.

Di lain pihak, orang tua mereka kurang begitu optimis. Dari 30 orang tua yang berpartisipasi dalam FGD, hanya enam orang yang menyatakan akan tetap menyekolahkan anak mereka ke SMP. 24 sisanya mengakui bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk terus menyekolahkan anak mereka ke SMP karena masalah jarak serta biaya karena sekalipun seandainya mereka menitipkan anak di rumah kerabat di dekat SMP reguler, mereka meyakini bahwa mereka masih harus mengeluarkan biaya untuk mereka, sesuatu yang tidak mungkin mereka tanggung.

Mengingat bahwa keputusan mengenai masa depan anak kebanyakan diambil oleh orang tua maka jelaslah bahwa kehadiran SMP Satu Atap telah memungkinkan anak-anak meneruskan pendidikan ke jenjang SMP. Seandainya tidak, seperti diungkapkan oleh kebanyakan orang tua, peluang mereka untuk meneruskan ke SMP akan sangat kecil.

5.2. Dampak SMP Satu Atap pada Angka Meneruskan Pendidikan dari SD ke SMP

Didirikannya SMP Satu Atap secara signifikan meningkatkan jumlah anak yang meneruskan pendidikan dari SD ke SMP. Dari sembilan kepala sekolah SMP Satu Atap yang berpartisipasi dalam FGD, didapati bahwa sebelum didirikannya SMP Satu Atap ternyata angka rata-rata untuk meneruskan pendidikan dari SD ke SMP adalah sekitar 13 persen. Sekalipun demikian, tidak semua siswa ini meneruskan ke SMP reguler. Banyak di antara mereka meneruskan pendidikan ke Pesantren, mengikuti Paket B, atau mengikuti SMP Terbuka. Sesudah SMP Satu Atap didirikan, sekitar 98,22 persen lulusan SD meneruskan ke SMP Satu Atap.

Capaian ini juga diakui oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yang menyatakan bahwa sebelum SMP Satu Atap didirikan, angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP adalah sekitar 5-10 persen, dan sesudah kehadiran SMP Satu Atap angkanya meningkat hingga 90-100 persen.

Tingginya angka melanjutkan sekolah ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa siswa sudah kenal baik dengan sekolahnya, jaraknya yang cukup dekat dari rumah, dan juga karena besarnya dukungan serta sosialisasi terus menerus dari guru-guru SD itu sendiri.

5.3. Peran Penting SMP Satu Atap dalam Meningkatkan Angka Partisipasi dalam Pendidikan SMP di Daerah bersangkutan

Untuk menganalisa dampak SMP Satu Atap terhadap angka partisipasi pendidikan SMP di daerah tempat mereka didirikan, penelitian ini akan berfokus pada analisa Angka Partisipasi Murni tanpa Paket B. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa siswa SMP Satu Atap pastilah anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, Paket B, yang mungkin mencakup orang-orang di luar usia sekolah tidak dimasukkan

dalam analisis. Jadi, hanya dengan melihat Angka Partisipasi Murni akan didapatkan pandangan menyeluruh yang lebih relevan tentang apakah SMP Satu Atap telah memberikan kontribusi pada angka partisipasi SMP, bukannya menganalisa Angka Partisipasi Kasar yang mencakup mereka yang bukan usia sekolah dan peserta Paket B. Untuk melihat sejauh mana perubahan Angka Partisipasi Murni di daerah di mana SMP Satu Atap didirikan, penelitian ini juga membandingkannya dengan Angka Partisipasi Murni di daerah Sukabumi yang tidak memiliki SMP Atap.

Tabel 5.3. Angka Partisipasi Murni Tanpa Paket B di Kecamatan dengan SMP Satu Atap

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah Satu Atap	APM dalam % Tanpa Paket B di Kecamatan dengan Sekolah Satu Atap				Peningkatan APM total dalam tiga tahun (%)
			2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
1	Cibitung	1	30.38	48.98	17.54	109.92	79.54
2	Ciemas	1	43.45	60.01	63.83	112.95	69.50
3	Cikakak	2	48.44	73.05	43.63	79.83	31.39
4	Cikembar	1	67.74	78.15	82.36	84.96	17.22
5	Ciracap	1	68.52	79.14	57.73	89.44	20.92
6	Cisolok	1	44.60	60.21	39.66	113.16	68.56
7	Curugkembar	1	38.61	63.25	65.17	92.05	53.44
8	Jampangkulon	1	47.41	61.62	50.38	129.39	81.98
9	Kalibunder	1	61.79	68.46	72.47	164.81	103.02
10	Sagaranten	1	39.27	52.40	53.83	85.70	46.43
11	Simpenan	1	49.17	61.67	57.43	99.00	49.83
12	Surade	3	63.62	81.50	68.52	104.47	40.85
13	Tegalbuleud	3	30.64	48.14	48.42	80.78	50.14
14	Waluran	1	45.87	91.57	71.52	66.25	20.38
APM rata-rata			48.54	66.30	56.61	100.91	52.37

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2011

Tabel 5.4. Angka Partisipasi Murni Tanpa Paket B di Kecamatan tanpa SMP Satu Atap

No.	Kecamatan	APM dalam % Tanpa Paket B di Kecamatan tanpa Sekolah Satu Atap				Peningkatan APM total dalam tiga tahun (%)
		2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	
1	Bantargadung	42.41	76.07	36.91	91.50	49.09
2	Bojonggenteng	58.56	73.45	77.94	125.24	66.68
3	Caringin	43.42	61.32	60.47	73.83	30.41
4	Ciambur	N/A	N/A	N/A	51.45	N/A
5	Cibadak	74.03	85.91	91.31	91.32	17.29
6	Cicantayan	49.26	60.84	57.45	60.56	11.30
7	Cicurug	69.90	87.77	71.02	73.97	4.07
8	Cidadap	61.41	63.95	69.95	83.52	22.11
9	Cidahu	56.34	68.78	61.10	90.04	33.70
10	Cidolog	44.30	47.93	59.58	57.99	13.69
11	Cikidang	47.58	57.66	51.07	73.17	25.59
12	Cimanggu	N/A	N/A	N/A	55.07	N/A
13	Cireunghas	61.94	78.02	73.14	94.79	32.85
14	Cisaat	61.76	72.17	76.12	72.97	11.21
15	Gegerbitung	50.44	67.36	68.09	100.61	50.17
16	Gunungguruh	50.67	64.15	77.32	65.17	14.50
17	Jampangtengah	39.37	50.92	53.95	83.05	43.68
18	Kabandungan	34.57	55.62	50.62	59.52	24.95
19	Kadudampit	75.59	85.07	81.50	85.89	10.30
20	Kalapanunggal	71.21	85.17	71.64	155.50	84.29
21	Kebon Pedes	45.03	52.21	50.41	53.93	8.90
22	Lengkong	50.97	67.18	42.75	82.97	32.00
23	Nagrak	43.11	56.63	76.53	91.23	48.12
24	Nyalindung	58.03	68.37	81.76	69.62	11.59
25	Pabuaran	62.96	73.32	59.90	136.93	73.97
26	Parakansalak	73.56	97.67	81.94	111.93	38.37
27	Parungkuda	62.07	82.31	68.80	84.71	22.64
28	Pelabuhanratu	74.59	95.82	74.20	105.57	30.98
29	Purabaya	69.44	83.96	72.62	92.11	22.67
30	Sukabumi	38.99	45.12	43.22	41.15	2.16
31	Sukalarang	48.84	61.45	58.35	67.09	18.25
32	Sukaraja	50.98	64.98	69.74	61.43	10.45
33	Warungkiara	65.30	80.18	77.71	77.90	12.60
APM rata-rata		56.02	70.04	66.04	82.48	26.46

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2011

Bila kita bandingkan dua tabel di atas, tampak jelas bahwa keduanya memperlihatkan irama yang sama, menunjukkan APM Sukabumi antara tahun 2005-2009 berfluktuasi tetapi cenderung naik. Akan tetapi, di kecamatan-kecamatan di mana SMP Satu Atap didirikan, APM rata-ratanya dalam periode 2005-2009 terus meningkat signifikan lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lain. Sementara APM dengan SMP Satu Atap 2008-2009 naik sebesar 52,37 persen dibanding angka tahun 2005-2006, kecamatan-kecamatan lain hanya menunjukkan kenaikan sekitar 26,46 persen pada periode yang sama. Ini berarti bahwa peningkatan yang terjadi di kecamatan-kecamatan dengan SMP Satu Atap hampir dua kali lipat APM kecamatan-kecamatan lainnya.

Sayangnya, tampak bahwa makin tinggi jumlah SMP Satu Atap yang dibangun di suatu kecamatan tidak secara otomatis mengakibatkan kenaikan yang lebih besar. Di kecamatan Tegalbuleud yang memiliki tiga SMP Satu Atap, antara tahun 2005-2006 hingga 2008-2009 APMnya hanya meningkat sebesar 50,14 persen. Kecamatan Cikakak yang memiliki dua SMP Satu Atap, APMnya hanya meningkat 31,39 persen. Di lain pihak, Kecamatan Jampang Kulon dan Kalibunder yang masing-masing memiliki satu SMP Satu Atap, antara 2005-2006 hingga 2008-2009 masing-masing mengalami kenaikan APM sebesar 81,98% dan 103,02%. Ini juga konsisten dengan jumlah siswa yang masuk ke sekolah tersebut (seperti terlihat dalam tabel 5.3 di atas), jumlah siswa rata-rata per sekolah di SMP Satu Atap Jampang Kulon dan Kalibunder mencapai 185,5 orang per sekolah sementara angka rata-rata Tegalbuleud, dan Cikakak hanya 131,2 siswa per sekolah. Penelitian lebih jauh mungkin perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dan mengapa sejumlah SMP Satu Atap bisa lebih efisien dan efektif dalam menarik lebih banyak siswa sehingga memberikan sumbangan lebih besar dalam meningkatkan APM di kecamatannya.

5.4. SMP Satu Atap dan Angka Putus Sekolah di SMP

Dalam hal angka putus sekolah, diakui bahwa angkanya setara dengan SMP reguler. Sembilan Kepala sekolah SMP Satu Atap yang berpartisipasi dalam FGD menyebutkan bahwa angka putus sekolah di sekolah mereka sekitar 0,5 sampai 10 persen, dengan mayoritas, enam kepala SMP Satu Atap, mengatakan bahwa angka putus sekolah di tempat mereka berkisar sekitar 0,5 sampai 2%. Dua Kepala SMP Satu Atap mengatakan bahwa angka putus sekolah di tempat mereka sekitar sepuluh persen. Hal ini juga diakui oleh para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang mengatakan bahwa angka putus sekolah di SMP Satu Atap relatif sama dengan SMP reguler di mana kehadiran siswa dipantau ketat dan ketika siswa sering mangkir maka guru atau anggota komite sekolah diminta untuk melakukan kunjungan ke rumah untuk memeriksa dan mendorong anak untuk kembali bersekolah.

Sebagai alternatif untuk SMP reguler, SMP Satu Atap bahkan diakui sebagai pilihan terbaik dibandingkan dengan Paket B, dan khususnya, SMP terbuka yang memiliki angka putus sekolah tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan yang disampaikan oleh Pejabat-pejabat Dinas Kependidikan Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2011, dari 281 kasus drop-out di Sukabumi, 178 di antaranya berasal dari SMP Terbuka. Hal ini terutama disebabkan karena anak tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka berisiko kehilangan motivasi pada pendidikan dan memutuskan mengambil peluang bekerja di kota.

Oleh karena itu, kehadiran SMP Satu Atap terbukti lebih efektif untuk memastikan-anak-anak tetap di sekolah dan juga lebih efektif untuk mengurangi insiden putus sekolah di wilayah tersebut.

5.5. Signifkansi SMP Satu Atap dalam Memperbaiki Prospek Pekerjaan Anak-anak

Para peserta menganggap bahwa meskipun ada lebih banyak pilihan bagi para lulusan SMP, tetapi pilihan itu tetap tidak banyak. Bila lulusan SD mungkin hanya memiliki plihan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau, untuk kebanyakan anak laki-laki, menjadi buruh tani, maka lulusan SMP dapat bekerja “resmi” sebagai pegawai pabrik karena untuk bekerja di pabrik mereka sedikitnya harus lulusan SMP.

Meskipun mengakui bahwa secara teoretis peluang yang dimiliki oleh lulusan SMP lebih luas dari pada lulusan SD, mayoritas peserta mengatakan bahwa anak-anak tersebut masih belum siap untuk langsung meraih peluang segera setelah lulus. Ini dikarenakan SMP Satu Atap tidaklah berorientasi pada pendidikan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk memiliki keterampilan khusus. Karena itu banyak di antara mereka akhirnya tetap bekerja sebagai pekerja domestik atau buruh tani. Akan tetapi, paling tidak lulusan SMP lebih diberdayakan dan lebih matang pemikirannya daripada lulusan SD. Cara berpikir yang lebih baik akan menolong mereka untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara yang lebih baik di tempat kerja mereka. Dalam jangka panjang dan dengan pandangan yang lebih positif, mereka mungkin bisa memimpin desa mereka karena pimpinan desa setidaknya haruslah seorang lulusan SMP.

Sebagai kesimpulan, lulusan SMP memiliki peluang kerja yang lebih baik, meskipun tidak terlalu jauh berbeda dari pada yang dimiliki oleh lulusan SD. Akan tetapi, agar peluang ini menjadi kenyataan, siswa harus didukung dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sayangnya, justru inilah yang tidak disediakan oleh SMP Satu Atap saat ini.

5.6. Dampak SMP Satu Atap terhadap Kegiatan Anak-Anak

Seluruh peserta mengakui bahwa pendirian SMP Satu Atap menimbulkan perubahan signifikan terhadap kegiatan anak-anak. Sebelum SMP Satu Atap didirikan, anak-anak umumnya menganggur atau membantu orang tua bekerja, tetapi sesudahnya anak-anak bisa menghabiskan waktu di sekolah dan belajar. Di samping itu, sebelum didirikan SMP Satu Atap, banyak anak, terutama perempuan, menikah sekalipun menurut Perundangan Indonesia mereka masih di bawah usia menikah. Meskipun demikian, anak-anak tersebut jarang bekerja penuh karena tidak ada banyak kesempatan kerja di desa mereka. Bila bekerja, mereka biasanya melakukan apa yang orang tua mereka lakukan, seperti bekerja sebagai buruh tani, memeras kelapa(menyadap nira??). Tetapi kebanyakan pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara teratur, biasanya hanya membantu orang tua selama tiga atau empat jam saat beban kerja sedang tinggi. Namun demikian, beberapa anak mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pabrik atau pekerja rumah tangga di kota. Beberapa di antara mereka juga mengikuti program Paket B (pendidikan non-formal setara SMP) atau belajar di Pesantren. Pengamatan ini juga sesuai dengan informasi yang diterima dari anak-anak yang saat ini sudah tidak bersekolah. Dari enam yang diwawancarai, tak satu pu dari anak perempuan itu bekerja sementara tiga anak laki-lakinya bekerja. Di antara mereka yang bekerja, hanya satu orang yang bekerja penuh waktu (dua lainnya bekerja paruh waktu).

Sesudah didirikan SMP Satu Atap, anak-anak menghabiskan waktu secara signifikan untuk bersekolah dan belajar (mengerjakan PR atau bersiap untuk ujian). Meskipun demikian, peserta juga mengakui bahwa sejumlah anak (sekitar 10-20%) juga bekerja membantu orang tua meskipun dengan jumlah jam kerja yang tidak signifikan, sekitar 4 sampai 15 jam per minggu, yang masih dianggap sebagai kerja

ringan, dan kebanyakan dilakukan oleh anak laki-laki. Baik guru, orang tua, maupun anak-anak mengakui bahwa kebanyakan pekerjaan yang dilakukan anak-anak itu tidak mengganggu pelajaran karena yang mereka lakukan hanyalah pekerjaan ringan sebagai selingan saat menganggur di luar jam sekolah atau belajar. Waktu belajarnya dengan demikian lebih banyak. Lebih dari setengah dari anak-anak peserta (17 dari 33 siswa) bekerja paruh waktu antara 4 hingga 15 jam per minggu (lihat Tabel 5.6). Hanya ada dua anak perempuan di antara 17 siswa yang ditemukan bekerja.

Sesuai dengan dilaporkan yang sebelumnya oleh para guru dan orang tua, penting untuk dicatat bahwa dari segi gender, tidak ada perbedaan jelas dalam kegiatan anak-anak tersebut. Seperti dapat disimpulkan dari penjelasan anak-anak tentang kegiatan harian mereka dalam FGD, satu-satunya yang relatif sama antara dua jenis kelamin itu adalah fakta bahwa kedua kelompok kurang lebih menghabiskan waktu yang sama (8 jam) untuk tidur. Tabel 5.7 dan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa anak perempuan biasanya menghabiskan waktu satu jam lebih banyak untuk belajar, satu jam lebih sedikit untuk bermain dan kegiatan rekreasi, dibandingkan dengan anak laki-laki. Di lain pihak, dibandingkan dengan anak-anak perempuan maka anak laki-laki menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja dan lebih sedikit untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Selain itu ditemukan bahwa mayoritas siswa laki-laki ditemukan bekerja, dan hanya tiga dari 18 peserta (atau 16,67%) tidak bekerja, tujuh bekerja antara 3-6 jam per minggu, dan delapan siswa laki-laki bekerja antara 6-17 jam per minggu. Di lain pihak, kebanyakan anak perempuan (13 dari 15 siswi) tidak ditemukan bekerja, satu anak bekerja 6-17 jam per minggu dan satu lainnya bekerja 16-18 jam per minggu. Selanjutnya, ketika ditanya jenis pekerjaan rumah tangga apa yang dilakukan, kebanyakan anak perempuan bertanggung jawab untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh adik-adik mereka, sementara anak laki-laki bertanggung jawab untuk mengumpulkan kayu atau mengambil air.

Perbedaan antara kegiatan anak-anak tersebut memperlihatkan bahwa orang mungkin memiliki harapan yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan masih diharapkan untuk tinggal di rumah, mengerjakan tugas rumah tangga atau belajar sedangkan anak laki-laki diharapkan untuk berada di luar, bermain atau membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyumbang pendapatan keluarga.

Mempertimbangkan jumlah jam kerja menurut uraian kegiatan anak-anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa tak satu pun dari mereka melakukan pekerjaan yang dapat membuat mereka dikategorikan sebagai "pekerja anak." Namun demikian, bila pekerjaan tersebut digabungkan dengan tugas-tugas rumah tangga, maka kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang harus dilakukan oleh salah satu anak perempuan itu rasanya cukup mengkhawatirkan karena banyaknya waktu yang dihabiskan – 18 jam per minggu untuk bekerja dan 14 jam per minggu untuk melakukan tugas rumah tangga. Tetapi, pekerjaan itu sendiri (memberikan pelajaran agama untuk siswa siswi SD) tidak termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Lebih dari itu, bagi si anak yang melakukannya, pekerjaan tersebut dianggap "memberdayakan" dan ia sangat bangga melakukannya dan tidak menganggapnya mengganggu pendidikan. Oleh karena itu, pekerjaan itu tidak dapat digolongkan sebagai perburuan anak dalam artian umum, yaitu pekerjaan yang "mengakibatkan anak kehilangan masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya" (ILO, 2011).

Tabel 5.6. Jumlah Siswa siswi yang Bekerja

Jumlah Siswa (laki-laki)	Tidak Bekerja	Bekerja 3-6 jam per minggu	Bekerja 6-15 jam per minggu	Bekerja 16-18 jam per minggu
	3	7	8	0
Jumlah Siswi Perempuan	13	0	1	1

Tabel 5.7. Kegiatan Harian Anak Perempuan

Kegiatan Harian Anak Perempuan							
No.	Belajar (Termasuk pelajaran agama)	Bermain dan Kegiatan Rekreasi	Tugas rumah tangga	Bekerja	Tidur	Jam per minggu	Jenis pekerjaan
1	11	4	2	0	7		
2	10	3	2	0	9		
3	13	3	1	0	7		
4	6	6	4	0	8		
5	7	3	5	0	9		
6	6	5.5	2	3	7.5	18	Memberi pelajaran Agama untuk siswa SD
7	8	6	3	0	7		
8	8	5	1	2	8	12	Membersihkan SD
9	7	6	3	0	8		
10	7	7	3	0	7		
11	7	5	3	0	9		
12	7	5	3	0	9		
13	9	5	2	0	8		
14	7	5	2	0	10		
15	10	4	2	0	8		
Jumlah jam rata-rata untuk setiap kegiatan	8.2	4.83	2.53	0.33	8.1		

Tabel 5.8. Kegiatan Harian Siswa (laki-laki)

Kegiatan Harian Siswa							Jenis Pekerjaan
No.	Belajar (Termasuk pelajaran agama)	Bermain dan Kegiatan Rekreasi	Tugas rumah tangga	Bekerja	Tidur	Jam per minggu	
1	8	6	3	0	7	0	
2	7	7	3	0	7	0	
3	6	5	6	0	7	0	
4	6	4	3	2	9	4	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
5	9.5	4	1	2	7.5	6	Mengojek
6	9.5	4	1	2	7.5	6	Mengojek
7	6	6	0	3	9	9	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
8	6	6	0	3	9	9	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
9	7	6	0	2	9	6	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
10	7	6	0	2	9	6	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
11	7	4	1	2	10	6	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
12	7	6	3	1	7	3	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
13	8	5	1	2	8	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
14	8	5	1	2	8	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
15	6	8	1	2	7	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
16	6	8	1	2	7	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
17	8	5	1	2	8	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
18	6	8	0	2	8	14	Menggembala ternak atau mengambil rumput untuk ternak
Jumlah jam rata-rata untuk setiap kegiatan	8.2	4.83	2.53	0.33	8.1		

Tujuan bagian ini adalah memberikan informasi bahwa dengan didirikannya SMP Satu Atap sekalipun masih tetap ada beberapa anak yang memilih untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Melalui wawancara langsung dengan anak-anak putus sekolah tersebut, penelitian ini juga menggali alasan-alasan mereka tidak meneruskan pendidikan SMP dan mencari tahu apa saja kegiatan mereka. Investigasi ini penting karena beberapa alasan, antara lain:

- Dengan mengetahui alasan mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke SMP kita bisa memperoleh gambaran luas tentang hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh anak-anak tersebut atau fakto-faktor lain yang menghalangi mereka untuk bersekolah.
- Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak putus sekolah ini kita dapat menguatkan kesahihan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain mengenai kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan anak-anak di daerah tersebut, tentang pekerjaan yang mereka lakukan, dll.
- Dengan mengetahui kegiatan mereka kita dapat memperoleh gambaran luas tentang apa yang mungkin mereka lakukan seandainya tidak ada SMP Satu Atap di daerah mereka dan dengan demikian mereka tidak bisa bersekolah.

6.1. Alasan-alasan Tidak Melanjutkan ke SMP

Meskipun sudah ada SMP Satu Atap yang antara lain bertujuan untuk mengurangi jarak dari rumah ke sekolah, dari wawancara dengan beberapa anak putus sekolah, didapati bahwa banyak anak putus sekolah itu masih menganggap jarak dari rumah ke sekolah sebagai kendala. Jarak ke sekolah terdekat, yaitu SMP Satu Atap kurang lebih 1 sampai 5 km, dengan mayoritas (75%) dari yang diwawancarai tinggal dalam jarak 2km dari SMP Satu Atap. Ini juga salah satu alasan utama bahwa, meskipun semua yang diwawancarai mengetahui adanya SMP Satu Atap, dua di antaranya masih menganggap hal ini sebagai salah satu faktor utama yang membuat mereka memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah ke SMP Satu Atap di daerah mereka (lihat tabel 6.2 dan 6.1).

Namun demikian, alasan-alasan utama bahwa anak tidak meneruskan pendidikan ke sekolah menengah kebanyakan adalah masalah keuangan, kurangnya motivasi, dan keharusan bekerja. Tiga dari enam yang diwawancarai mengatakan bahwa faktor-faktor tersebutlah alasan utama mereka. Menarik untuk dilihat bahwa di antara tiga anak yang bekerja, hanya satu yang melakukannya karena menganggap tidak memiliki pilihan lain. Anak ini harus bekerja karena tidak memiliki orang tua dan harus mengurus kakek nenek dan adiknya yang masih bersekolah. Meskipun dua anak lainnya juga bekerja, mereka tidak melakukannya karena keharusan mencari nafkah. Sebaliknya, mereka bekerja karena mereka tidak berminat untuk melanjutkan ke SMP. Ini terutama karena “sekolah membosankan,” kata salah satu anak di Kecamatan Surade dan “Kalau sekolah saya harus bangun pagi-pagi”, kata satu anak lain dari Kecamatan Surade. Selain itu, ada satu anak putus sekolah lain yang tidak bekerja dan tidak pula bersekolah karena kurangnya motivasi.

Oleh karena itu, kadang kala bukanlah pekerjaan dan bukan pula tidak adanya sekolah yang membuat anak-anak memilih untuk tidak bersekolah. Kadang-kadang, justru sebaliknya. Mereka bekerja dan memilih untuk tidak bersekolah karena kurangnya motivasi dan – sampai taraf tertentu – karena “kurang menariknya” kegiatan sekolah. Untuk kasus ini, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang berbeda.

Dari wawancara dengan anak-anak putus sekolah itu, didapati bahwa beban tugas-tugas rumah tangga yang lazimnya menjadi tanggung jawab anak perempuan dapat menghalangi seorang anak untuk meneruskan sekolah. Dalam penelitian ini, salah satu anak yang diwawancarai didapati tidak bisa meneruskan pendidikan karena, semenjak orang tuanya pergi (ibu bekerja di luar negeri, ayah meninggalkannya), ia membantu kakek-nenek melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh adiknya, dll. Setiap hari ia menghabiskan sekitar 13 jam untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Kehidupannya praktis berputar di sekitar rumah dengan hanya beberapa jam yang tersisa untuk beristirahat dan bermain.

Tabel 6.1. Pengetahuan Anak tentang Keberadaan SMP Satu Atap dan Jarak dari Rumah ke Sekolah

No.	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Sekolah Terdekat	Jarak ke Sekolah Terdekat (dlm KM)	Tahu tentang adanya SMP Satu Atap	
					Tahu	Tidak
1	M	15	Sukatani	1	√	
2	M	14	Sukatani	1	√	
3	M	15	Karang Anyar - Jampang Kulon	2	√	
4	F	12	Karang Anyar - Jampang Kulon	1	√	
5	F	14	Margawati	4	√	
6	M	15	Margawati	5	√	

Sumber: Anak-Anak Putus Sekolah di tiga Daerah dengan Sekolah Satu Atap, Juni 2011

Tabel 6.2. Alasan Utama tidak Melanjutkan ke SMP

No.	Jenis Kelamin	Alasan utama tidak meneruskan ke SMP					
		Masalah Keuangan	Jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh	Harus melakukan Pekerjaan Rumah Tangga	Kurang Motivasi	Harus bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga	Jam per hari (untuk anak yang harus bekerja atau melakukan tugas rumah tangga)
1	M	√	√			√	7
2	M				√	√	5
3	M				√		
4	M				√	√	4
5	F	√					
6	F	√	√	√			13

Sumber: Anak-anak Putus Sekolah di tiga Daerah SMP Satu Atap, Juni 2011

6.2. Kegiatan Anak-anak Putus Sekolah

Dari tabel 6.3, dapat di lihat bahwa tiga dari anak putus sekolah yang diwawancarai sudah bekerja dan seluruhnya adalah laki-laki. Dari empat anak laki-laki tersebut hanya satu yang tidak bekerja. Dari tiga anak yang bekerja, satu bekerja penuh waktu; dua bekerja paruh waktu. Ketika bekerja, mereka terutama melakukan pekerjaan pertanian seperti; memeras kelapa (menyadap nira???), menggembala ternak, bertani, dll. Di antara tiga anak yang bekerja, hanya satu orang yang bekerja untuk orang lain, dua lainnya bekerja untuk orang tua sendiri. Secara rata-rata, anak laki-laki putus sekolah hanya menghabiskan waktu harian mereka sebanyak 1,04 persen untuk melakukan kegiatan terkait dengan pelajaran, 32,29 persen untuk bermain dan kegiatan rekreasi, 8,33 persen untuk melakukan tugas rumah tangga, 16,67 persen untuk bekerja dan 41,67 persen untuk tidur.

Akan tetapi anak perempuan biasanya memiliki jalan hidup yang lain. Tak satu pun dari anak perempuan itu melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu anak perempuan masuk Pesantren dan mengalokasikan sebagian besar waktunya, sembilan jam sehari, untuk belajar dan enam jam untuk kegiatan rekreasi. Tetapi salah satu anak perempuan yang diwawancarai menghabiskan waktu hariannya untuk melakukan tugas rumah tangga hingga tiga belas jam per hari dan memiliki tiga jam untuk kegiatan rekreasi. Namun demikian, keduanya kurang lebih memiliki waktu tidur yang sama (7-8 jam). Rata-rata, anak perempuan putus sekolah yang diwawancarai menghabiskan lima jam sehari untuk belajar, lima jam untuk bermain, tujuh jam untuk melakukan tugas rumah tangga, dan 7,5 jam untuk tidur. Mengingat kecilnya jumlah sampel dan kegiatan yang dikemukakan dua ini secara signifikan sangat berbeda, temuan ini mungkin sebaiknya dilihat untuk mencerminkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi anak perempuan bila mereka tidak meneruskan ke SMP. Pilihan-pilihan yang tampaknya tersedia bagi mereka adalah: mengerjakan tugas-tugas rumah tangga atau masuk ke pesantren. Mereka tidak diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah.

Tabel 6.3. Kegiatan Sehari-hari Anak Putus Sekolah (dalam jam)

Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Belajar (Termasuk belajar agama)	Bermain dan Kegiatan Rekreasi	Pekerjaan Rumah Tangga	Bekerja	Tidur	Keterangan	
							Jam Kerja per minggu	Jenis Pekerjaan
F	14	1	3	13	0	7		
F	12	9	6	1	0	8		
Rata-rata		5	4.5	7	0.00	7.5		Kerja pertanian dan peternakan (menggembala ternak)
M	15	0	5	2	7	10	42	
M	15	1	6	3	5	9	30	Kerja pertanian (memeras kelapa)
M	15	0	12	0	0	12		
M	14	0	8	3	4	9	24	Kerja pertanian (memeras kelapa)
On Average		0.25	7.75	2	4.25	10		

Sumber: Anak-anak Putus Sekolah di tiga Daerah Sekolah Satu Atap, Juni 2011

7.

SMP Satu Atap dan Pengurangan Pekerja Anak

Ketika sampai pada penilaian dampak SMP Satu Atap terhadap penghapusan Pekerja Anak, tidak ada jawaban langsung yang jelas dari peserta karena mereka sendiri tidak menganggap daerah mereka sebagai daerah dengan masalah pekerja anak dan oleh karena itu tidak ada yang perlu dikurangi. Ketika ditanya tentang persoalan pekerja anak, peserta secara seragam menyatakan bahwa insiden perburuhan anak sangatlah rendah bahkan pada saat sebelum didirikan SMP Satu Atap. Rendahnya insiden pekerja anak disebabkan oleh fakta bahwa pada dasarnya daerah ini tidak memiliki kesempatan kerja yang signifikan dan oleh karena itu di daerah ini tidak terlihat ada insiden pekerja anak. Bahkan ketika anak-anak tidak bersekolah dan kemudian memutuskan untuk bekerja, maka kebanyakan hanya bekerja paruh waktu untuk membantu orang tua sebagai alternatif dari pada menganggur. Pekerjaan yang mereka lakukan pun jenis pekerjaan yang biasa dilakukan siswa siswi SMP Satu Atap.

Kurangnya kesempatan kerja juga ditegaskan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak putus sekolah. Ketika diwawancarai hanya ada satu dari enam anak yang melakukan dua pekerjaan paruh waktu; kerja pertanian di pagi hari dan menggembala ternak di siang hari. Tiga dari enam anak tersebut sama sekali tidak bekerja. Dan dua anak putus sekolah membantu usaha orang tua mereka (memeras kelapa untuk membuat gula merah) selama empat atau lima jam sehari, sekitar dua atau tiga hari seminggu.

Meskipun demikian faktanya, temuan ini hanya dapat menjelaskan anak-anak yang tidak bersekolah tetapi masih tinggal di desa bersangkutan, dan dengan demikian tidak dapat menguraikan kondisi sebenarnya dari seluruh anak putus sekolah. Tetapi, bila kita mempertimbangkan semua informasi lain dari peserta maka kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun tiga dari enam anak putus sekolah tidak ditemukan bekerja, mereka sangat berisiko menjadi pekerja anak. Seperti diindikasikan dari wawancara dengan anak-anak pusers sekolah tersebut, satu dari mereka pernah mencoba bekerja di pabrik di kota selama dua bulan pada tahun 2009 (dua tahun sebelum penelitian ini dilakukan). Karena tidak menyukai pekerjaan tersebut, ia kemudian memutuskan untuk pulang dan sekarang tidak bekerja dan tidak pula bersekolah. Lebih dari itu, dalam FGD dengan guru dan orang tua, mereka juga mengakui bahwa sebelum SMP Satu Atap didirikan, beberapa siswa berhasil memperoleh pekerjaan di kota. Oleh karena itu kiranya bisa diterima bila disimpulkan bahwa ada anak-anak putus sekolah yang meninggalkan

kampung halaman untuk bekerja di kota. Mempertimbangkan fakta ini, tampaknya bila mendapatkan kesempatan maka anak-anak putus sekolah itu kemungkinan akan mengambil peluang tersebut untuk bekerja penuh waktu di kota. Jadi, meskipun daerah ini tidak dilihat sebagai daerah pekerja anak oleh para peserta, risiko anak-anak putus sekolah untuk menjadi pekerja anak cukup tinggi.

Bila kita mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, maka kehadiran SMP Satu Atap tampaknya memiliki kontribusi yang signifikan dalam penghapusan pekerja anak. Kehadiran SMP Satu Atap secara signifikan meningkatkan minat meneruskan sekolah dari SD ke SMP dan dengan demikian meningkatkan APK SMP dengan mengurangi hambatan untuk bersekolah. Dengan bersekolah anak-anak tersebut memiliki kegiatan yang bisa menjadi alasan signifikan untuk menolak bekerja sekalipun ada tawaran. Di samping itu, dengan meneruskan sekolah di SMP Satu Atap, anak-anak menjadi "diberdayakan" untuk menolak kesempatan kerja karena mereka memiliki *mindset* yang berbeda tentang pentingnya pendidikan seperti diperlihatkan dalam FGD dengan orang tua dan anak-anak, mereka melihat pendidikan sebagai sesuatu yang penting untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan mereka semua akan menolak kesempatan untuk bekerja penuh waktu meskipun sejumlah anak akan mempertimbangkan untuk bekerja paruh waktu bila mendapat tawaran. Selain itu, tetap bersekolah akan membantu anak-anak untuk terus menghidupkan impian/cita-cita mereka. Seperti muncul dalam FGD, banyak anak yang memperlihatkan motivasi besar untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk mencapai cita-cita menjadi dokter, pilot dan pengusaha, dll. Harapan akan masa depan yang lebih baik dan keyakinan mereka akan pentingnya pendidikan untuk mencapai cita-cita, bagaimanapun kondisi mereka sekarang, akan membantu mereka untuk tetap bersekolah dan tidak terjerumus dalam perburuan anak.

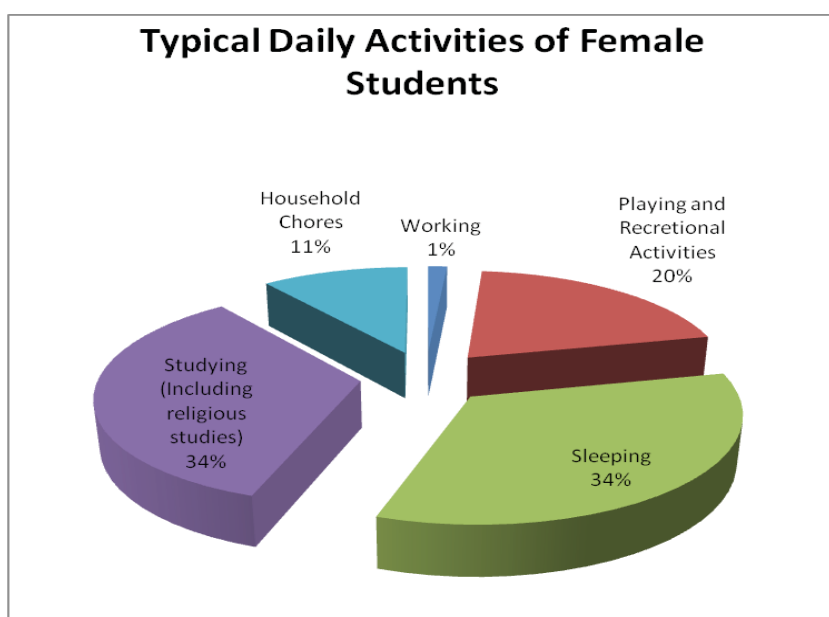
Selain itu, meskipun banyak siswa masih ditemukan bekerja, ketika kita bandingkan kegiatannya dengan rekan-rekan mereka yang putus sekolah – yang dapat memberikan gambaran luas tentang apa yang mungkin anak-anak lakukan seandainya tidak ada SMP Satu Atap di daerah mereka untuk meneruskan sekolah – dapat kita lihat bahwa SMP Satu Atap bisa memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan anak serta mengurangi pekerja anak dengan memperbaiki kualitas kegiatan mereka dengan menyediakan waktu belajar terstruktur dan dengan mengurangi waktu mereka bekerja, atau bagi anak perempuan, mengurangi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dari bagan 7.1 dan 7.2 dapat kita lihat bahwa di antara anak-anak perempuan, tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang bersekolah dan yang tidak. Kedua kelompok kurang lebih mengalokasikan jumlah jam yang sama untuk tidur (31-34% dalam sehari), untuk bermain dan kegiatan rekreasi (19-20%) dan untuk bekerja (0-1%). Akan tetapi, mereka secara signifikan berbeda dalam hal waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan belajar. Sudah sewajarnya, anak-anak yang putus sekolah menghabiskan waktu lebih sedikit untuk belajar (hanya 21% sedangkan yang masih bersekolah menyisihkan 34% waktu harian mereka untuk belajar) dan pembelajaran kebanyakan mereka lakukan secara informal (membaca ulang catatan mereka ketika SD atau mengikuti pelajaran agama). Di lain pihak, anak-anak putus sekolah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Bila para siswi umumnya hanya mengalokasikan 11% waktu harian mereka untuk mengerjakan tugas rumah tangga, rekan mereka yang tidak bersekolah menghabiskan 29% waktu harian mereka untuk tugas tersebut, yang berarti anak perempuan putus sekolah menghabiskan waktu 4,32 jam lebih lama untuk mengerjakan tugas rumah tangga dibandingkan dengan pelajar perempuan.

Hal yang sama juga berlaku untuk anak laki-laki. Dari bagan 7.3 dan 7.4 dapat kita lihat bahwa meskipun anak-anak yang bersekolah maupun yang putus sekolah tidak diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga (mereka hanya menghabiskan sekitar 6-8% waktu harian mereka untuk melakukan hal

ini), tetapi keduanya diharapkan melakukan sejumlah pekerjaan. Namun demikian, anak laki-laki yang tidak bersekolah menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja dibandingkan dengan anak laki-laki yang masih bersekolah. Pelajar laki-laki hanya mengalokasikan 7% waktu harian mereka untuk bekerja, sementara anak laki-laki putus sekolah bekerja sekitar 2,4 jam lebih lama dari pada rekan-rekan mereka yang masih bersekolah. Di lain pihak, anak-anak putus sekolah menikmati lebih banyak waktu untuk tidur, bermain dan melakukan kegiatan rekreasi lainnya. Umumnya, anak laki-laki putus sekolah menggunakan 74% waktu harian mereka untuk kegiatan-kegiatan ini sementara mereka yang masih bersekolah hanya menghabiskan 57% waktu mereka untuk bermain, melakukan kegiatan rekreasional, dan untuk tidur, yang berarti anak laki-laki putus sekolah bermain dan tidur empat jam lebih banyak dari pada anak-anak perempuan yang masih bersekolah. Perbedaan paling signifikan adalah waktu belajar mereka. Anak-anak putus sekolah hanya menggunakan 1% waktu mereka untuk belajar, umumnya belajar agama sementara pelajar laki-laki biasanya mengalokasikan 30% waktu mereka untuk belajar.

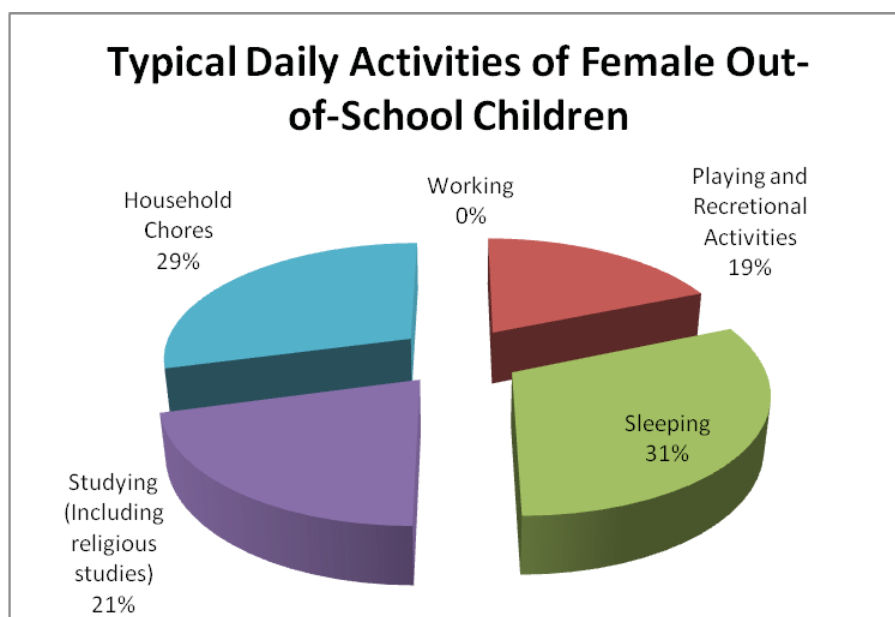
Sebagai kesimpulan, SMP Satu Atap secara signifikan berkontribusi dalam usaha menghapuskan pekerja anak, terutama dalam mencegah mereka untuk bekerja penuh dengan mempertahankan mereka di sekolah, mengalihkan kegiatan mereka dan dengan demikian meningkatkan kualitas kegiatan anak, meningkatkan kesadaran anak dan orang tua tentang pentingnya pendidikan, mengurangi waktu yang tersedia bagi anak untuk bekerja dan melindungi mereka dari tawaran untuk bekerja penuh.

Bagan 7.1 Kegiatan Harian Pelajar Perempuan



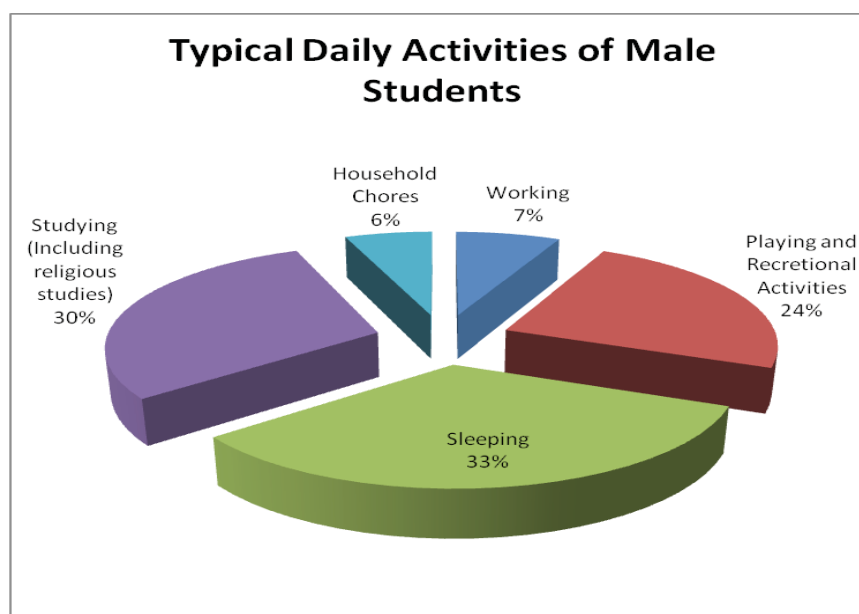
Sumber: Siswa siswi peserta FGD di tiga Sekolah Satu Atap, Sukabumi, Juni 2011

Bagan 7.2. Kegiatan Harian Anak Perempuan Putus Sekolah



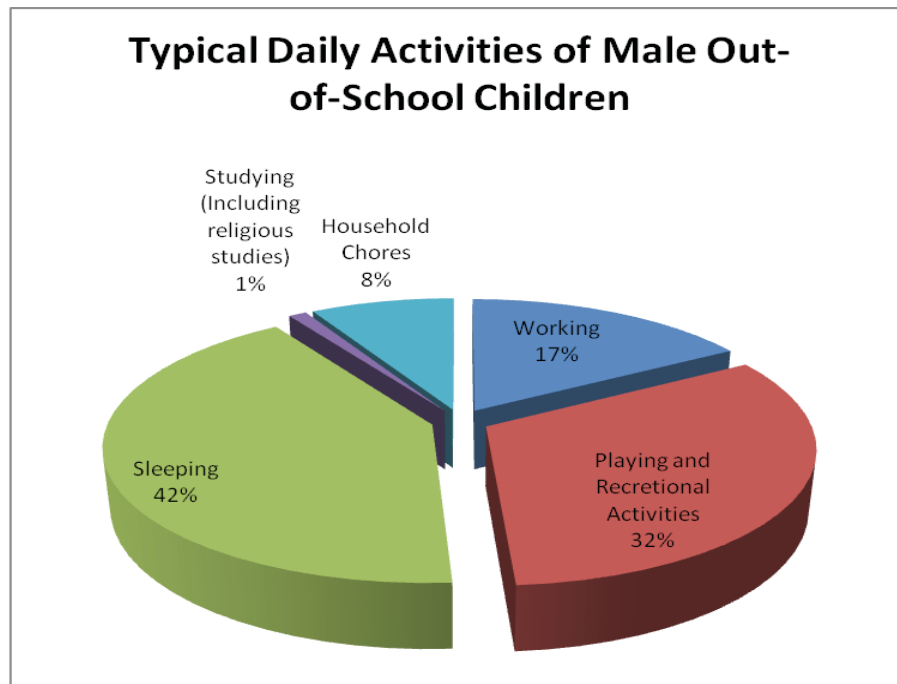
Sumber: Siswa siswi peserta FGD di tiga Sekolah Satu Atap, Sukabumi, Juni 2011

Bagan 7.3. Kegiatan Harian Pelajar Laki-laki



Sumber: Siswa siswi peserta FGD di tiga Sekolah Satu Atap, Sukabumi, Juni 2011

Bagan 7.4. Kegiatan harian Anak Laki-Laki Putus Sekolah



Sumber: Siswa siswi peserta FGD di tiga Sekolah Satu Atap, Sukabumi, Juni 2011

7.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh SMP Satu Atap dan pada gilirannya menurunkan mutu pendidikan yang diberikan oleh sekolah tersebut. Situasi ini, sayangnya, bukan eksklusif dialami oleh SMP Satu Atap saja. Grenado *et.al.* (2007) juga menggaris bawahi bahwa kualitas sekolah di Indonesia pada umumnya rendah, seperti tercermin dalam berbagai isu mengenai tingkat kualifikasi guru, struktur kompensasi guru, kualitas ruang kelas, angka kehadiran guru, ukuran kelas, dan infrastruktur yang buruk.

Sekalipun demikian, dengan berbagai tantangan dan mutu yang rendah seperti itu, kehadiran SMP Satu Atap juga membawa perubahan-perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kehadiran SMP Satu Atap secara positif telah mendorong orang tua dan anak-anak untuk meneruskan pendidikan ke SMP. Hal ini mengakibatkan peningkatan angka meneruskan pendidikan dari SD ke SMP. Selain itu, konsisten dengan meningkatnya angka melanjutkan sekolah, didapati pula bahwa daerah-daerah yang memiliki SMP Satu Atap memperlihatkan peningkatan Angka Partisipasi Murni yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. SMP Satu Atap terbukti lebih efektif untuk mempertahankan anak-anak di sekolah daripada sekolah-sekolah alternatif lain (Paket B atau SMP Terbuka). Lebih dari itu, SMP Satu Atap juga menunjukkan dampak positif dalam mengalihkan kegiatan anak-anak dari bekerja atau menganggur menjadi belajar untuk memberikan persiapan lebih baik bagi masa depan mereka. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa SMP Satu Atap telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penghapusan pekerja anak dengan mencegah mereka untuk bekerja penuh waktu/purna waktu.

Rekomendasi

Dari penelitian yang dilakukan dapat dibuat beberapa rekomendasi. Antara lain:

- Memperluas Program SMP Satu Atap. Mengingat dampak positif yang cenderung ditimbulkan oleh SMP Satu Atap, kiranya penting bahwa strategi ini diteruskan – khususnya di daerah-daerah yang memiliki angka partisipasi murni rendah dan risiko perburuan anak tinggi – guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dan berkontribusi pada penghapusan pekerja anak.

- Meningkatkan relevansi pendidikan dalam program SMP Satu Atap. Kebanyakan siswa SMP Satu Atap kemungkinan besar akan mengalami masalah keuangan setelah lulus dan hal ini akan menghalangi mereka melanjutkan ke SMA. Mereka kebanyakan akan terpaksa bekerja setelah lulus. Oleh karena itu, kiranya penting bagi SMP Satu Atap untuk mempersiapkan siswa mereka, misalnya, dengan memberikan pelatihan keterampilan *pre-vocational*, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan layak setelah lulus. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan motivasi anak untuk bersekolah dan bertahan di sana.
- Meningkatkan kualitas Program SMP Satu Atap dengan:
 - ◊ Menyediakan peralatan dan perlengkapan sekolah yang memadai
 - ◊ Merenovasi bangunan yang ada dan menyediakan gedung baru
 - ◊ Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru: memberikan pelatihan kompetensi, insentif yang lebih baik untuk guru, merekrut guru berkualifikasi di daerah tempat SMP Satu Atap berada, dll.
- Memaksimalkan SMP Satu Atap dalam usaha menghapuskan pekerja anak dengan:
 - ◊ Meningkatkan kesadaran di kalangan siswa siswi mengenai pentingnya pendidikan dan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak guna mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah (dan mendorong teman serta keluarga mereka untuk bersekolah atau tetap bertahan di sekolah) dan mengurangi niat mereka untuk bekerja penuh waktu, terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Hal ini dapat diintegrasikan dalam program reguler seperti pelajaran ilmu sosial, pendidikan kewarganegaraan, dll.
 - ◊ Memaksimalkan peran Komite Sekolah, terutama dalam menjangkau anak-anak putus sekolah dalam masyarakat dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan guna mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat.
- Melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa Program SMP Satu Atap dapat berkontribusi lebih efektif dibandingkan dengan program lain dalam meningkatkan angka partisipasi. Penelitian seperti ini penting untuk mempertahankan efisiensi program, terutama bila pendanaan masih dipandang sebagai salah satu kendala utama dalam implementasi SMP Satu Atap.
- Mendukung kegiatan-kegiatan akademis dan non-akademi di SMP Satu Atap. Sementara dukungan pada sekolah masih cenderung terfokus pada kualitas akademis, sejumlah SMP Satu Atap terbukti mampu bersaing di bidang non-akademis seperti olah raga dan seni, dan beberapa telah memenangkan berbagai kejuaraan daerah. Bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak ini seharusnya diakomodasi untuk membuat sekolah jadi lebih menarik. *school is more attractive*. Lagi pula, seni dan olah raga juga merupakan bagian penting dalam perkembangan anak yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan bukan saja keterampilan kognitif tetapi juga non kognitif, seperti kreatifitas, ketekunan, kepemimpinan, rasa percaya diri, rasa keadilan, dll.

Referensi

- Allais, F and Hagemann, F (2008), Child Labour and Education: Evidence from SIMPOC Survey, Geneva: International Labour Organization
- Centre for Statistic Bureau (2011), Net of Participation Rate by Province, 2003-2010, Jakarta: Centre for Statistic Bureau, as accessed on July 28, 2011, at: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=4
- Centre for Statistic Bureau and ILO (2009), Working Children in Indonesia 2009, Jakarta: Centre for Statistic Bureau
- Filmer, D. (2004), If You Build It, Will They Come? School Availability and School Enrolment in 21 Poor Countries, World Bank Policy Research Working Paper 3340, Washington, DC: World Bank .
- Granado, F., et.al. (2007), Investing in Indonesia's Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures, Jakarta: The World Bank Office.
- Guarcello, L., et.al (2005), Impact of Children's Work on School Attendance and Performance: A Review of School Survey Evidence from Five Countries, UCW-SIMPOC Working Paper March 2005, Rome: Understanding Children's Work Project
- Heady, Christopher (2000), "What is the Effect of Child Labour on Learning Achievement? Evidence from Ghana". Innocenti Working Paper No. 79. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre
- ILO (2007), Literature Review: Children's Non-Schooling Activities and Their Impact on Children's Health, Education, and Well-being, Geneva: ILO/IPEC-SIMPOC
- Indonesia Ministry of National Education (2005), BOS Program Guidelines, Jakarta: Ministry of National Education
- Indonesia Ministry of National Education (2007), Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Program Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP), Jakarta: Ministry of National Education
- International Labour Organisation (2011), About Child Labour, as accessed on July 28, 2011 at: <http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>
- International Labour Organisation (2011), ILO Conventions on child labour, as accessed on July 28, 2011 at: <http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm>
- Rachmat, Y, (2011), "Gaji Rp220.098 per bulan atau kurang, masuk orang miskin", Bisnis-Jabar.com, as accessed on July 28, 2011 at: <http://bisnis-jabar.com/index.php/2011/07/batas-angka-kemiskinan-di-jabar-rp220-098/>
- Weston (2008), A Study of Junior Secondary Education in Indonesia: A Review of the Implementation of Nine Years Universal Basic Education, Jakarta: Decentralized Basic Education Three Project, as accessed on July 28, 2011 at: <http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/IDNdprep08.pdf>

